Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Disusun oleh :

DINDA AYU SETYA NING TYAS

NIM : 1802056028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Dinda Ayu Setya Ning Tyas

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Dinda Ayu Setya Ning Tyas
NIM : 1802056028
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **" Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang "**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 08 Desember 2021

Pembimbing I

Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 197508152008011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5199/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Dinda Ayu Setya Ning Tyas
NIM	: 1802056028
Program studi	: Ilmu Hukum (IH)*
Judul	: Tinjauan Kriminologi tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang
Pembimbing I	: Hj. Brilliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
Pembimbing II	: Dr. M. Harun, S.Ag., MH.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Novita Dewi M., SH.MH.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
Penguji III	: Hj. Maria Anna M., MH
Penguji IV	: Drs. H. Maksun, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman"

(Q.S Ali 'Imran: 139)

*"**Remember! always involve God in all your affair**"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat pada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu

yang telah tulus melantunkan doa-doa terbaik, memberikan nasihat yang membangun dan bekerja keras untuk memberikan dukungan secara finansial bagi masa depan anak-anaknya.

Adik-Adik penulis

Semoga kelak tumbuh menjadi anak yang dapat bermanfaat bagi oarang-oarang disekitar, agama, dan negara.

Ibu Brilliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., Bapak M. Harun, S.Ag., M.H., dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

yang telah membimbing, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.

Seluruh Guru Penulis

yang telah berkenan mengajari, mendidik, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat hingga sampai pada tingkatan ini.

Semua sahabat, rekan berfikir dan teman seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2018, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2021

Deklarator,



Dinda Ayu Setya Ning Tyas

ABSTRAK

Terkonfirmasinya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 di Indonesia, membuat Presiden Republik Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut telah diperpanjang melalui Permenkumham No.32 Tahun 2020 dan Permenkumham No.24 tahun 2021. Pasca kebijakan tersebut diberlakukan pada masa pandemi Covid-19, terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana berupa pelanggaran asimilasi atau hak integrasi yang tercatat sampai dengan Oktober 2021 mencapai 151 kasus di Wilayah Jateng. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kebijakan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang serta mengetahui tinjauan kriminologi tentang kebijakan tersebut terhadap narapidana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian non-doktrinal, dengan pendekatan kriminologi yang diawali dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, guna mencari sebab musabab sebuah kejahatan baik secara umum maupun kasus individual, serta menganalisis implikasi sebuah kebijakan yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi atau hak integrasi pada pandemi Covid-19, pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Polrestabes Semarang. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang memusatkan perhatian untuk mengkaji perilaku-perilaku seseorang yang mengalami perubahan secara signifikan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 belum optimal. Hal ini terlihat adanya problem baru yang timbul pasca penerapannya seperti terjadinya pengulangan tindak pidana berupa pelanggaran asimilasi atau hak integrasi yang dilakukan oleh narapidana. Ada dampak positif yang timbul pasca penerapan salah satunya mengurangi masalah *overcrowded*, namun ada pula dampak negatifnya, seperti mekaisme penelitian kemasyarakatan yang kurang jelas, kondisi narapidana pada masa pandemi, hingga lemahnya sistem pengawasan dan pembimbingan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang baik agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana kembali berupa pelanggaran asimilasi dan hak integrasi oleh narapidana yaitu melalui pendekatan kriminologi untuk mengetahui kondisi narapidana sebelum dan sesudah pemberian haknya. Adapun rekomendasi penulis adalah menambahkan pasal baru yang mengatur tentang mekanisme penelitian kemasyarakatan, pengawasan dan pembimbingan pasca pemberian hak. Selain itu, memberikan sosialisasi urgensi pengawasan kepada pokmas dan pemerintah diharapkan ikut andil dalam mengatasi kesenjangan sosial yang dialami narapidana pasca dibebaskan.

Kata Kunci: Kriminologi, Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir. Aamiin Allahumma Aamiin. Atas rahmat Sang Maha Kuasa serta doa dan dukungan dari seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang"** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai hambatan dan kesulitan tentu penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak hambatan tersebut lebih mudah untuk dilalui. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Brilliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Ariyanto, Ibu Sumarningsih selaku kedua orang tua penulis, dan kedua adik penulis Tio dan Azril yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
3. Ibu Hj. Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan wakil kepala prodi Ilmu Hukum sekaligus sebagai mentor, motivator dan Ibu terbaik bagi penulis. Terimakasih atas ketulusan dan keikhlasan Ibu dalam membimbing penulis baik ketika dalam perkuliahan maupun diskusi internal di luar waktu perkuliahan. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. yang telah menjadi dosen wali terbaik selama awal semester sampai sekarang dan senantiasa memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Bapak Fajar Sodiq dari Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang dan Bapak Nuhi Risydan Al Anshori dari Kanwil Kemenkumham jateng atas kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset. Serta Polrestabes Semarang yang telah memberikan informasi sebagai pelengkap skripsi.
6. Rekan-rekan LRD (Lembaga Riset Debat) dan FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membuka wawasan penulis, membentuk kontruksi berpikir yang baik, serta memberikan banyak pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.
7. Rekan-rekan Ilmu Hukum 2018 terkhusus Siti Nariyah dan Dimas Fajar Maulana selaku rekan berpikir dan berdiskusi penulis, serta Nurul Komariah, Nur Latifah, dan Akhmad Sholih yang telah bersedia memberikan sumbangsih dukungan, doa dan telah menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas segala bantuan yang telah diberikan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca guna menunjang bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara umum kepada masyarakat maupun secara khusus bagi perkembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 18 November 2021

Dinda Ayu Setya Ning Tyas

NIM. 1802056028

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**

DEKLARASI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN UMUM **16**

A. Pengertian Kriminologi dan Teori Kejahatan 16
B. Konsep Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana 26
    1. Pengertian Asimilasi dan Hak Integrasi 26
    2. Kebijakan Permenkumham mengenai program Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19 27
    3. Sistem Pemberian Asimilasi bagi Narapidana 29
    4. Sistem Pemberian Hak Integrasi bagi Narapidana 33
C. Pengertian Narapidana dan Penggolongannya 37

D. Lembaga Pemasyarakatan dan Refleksi Pembinaannya 41
E. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana 47

BAB III KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG 52

A. Sistem Program Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pendemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang 52
B. Identifikasi Pasca Penerapan Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pendemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang 60
C. Relevansi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Pada Masa Pendemi Covid-19 terhadap Kondisi Narapidana 64

BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG IMPLIKASI KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG 69

A. Identifikasi Terhadap Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pasca Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Pada Masa Pendemi Covid-19 ...69
B. Tinjauan Kriminologi Mengenai Faktor Penyebab kriminalitas di Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Terhadap Narapidana .74

BAB V PENUTUP 85

A. Simpulan 85
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR LAMPIRAN 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Saat ini dunia sedang digemparkan oleh suatu virus baru yang telah menyebar luas diseluruh penjuru dunia yang dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah wabah virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga pada akhirnya menjadi pandemi global. Virus ini disebabkan oleh koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di dunia yang eksistensinya dipengaruhi oleh hubungan internasional, sehingga juga terdampak penyebaran Covid-19. Pada 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikonfirmasi terdampak Covid-19. Kasus terdeteksi setelah adanya seorang warga Jepang yang terjangkit Covid-19 yang mana sebelumnya dia berkunjung di Indonesia.[1]

Menanggapi kasus tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional tertanggal 14 Maret 2020. Presiden RI memberikan pengumuman tersebut melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Satu bulan setelah pengumuman tersebut tertanggal 9 April 2020, Semua provinsi di Indonesia mengkonfirmasi adanya kasus positif virus corona. Mengingat semakin banyak kasus positif virus corona, berbagai kalangan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah guna memberi perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan para tenaga medis dari ganasnya pandemi covid-19 yang terus bergulir tiada henti. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengambil langkah terbaik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mempermudah dan mempercepat penanganan covid-19. Hingga saat ini pemerintah terus bekerja keras memberikan jaminan perlindungan kesehatan untuk berbagai kalangan

[1] Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.4 No.1, 2020, hlm. 102.

masyarakat. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kesehatan tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan terkait sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 mengenai hal yang sama. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 diperpanjang kembali melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kemudian kebijakan tersebut diperbaharui dengan munculnya Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu atas dasar kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas, mengingat hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia *overcrowded*, sehingga rentan sekali tertular Covid-19. *Overcrowded* adalah suatu hal yang dialami Lapas atau Rutan yang mana jumlah penghuni melebihi kapasitas yang telah ditentukan. *Overcrowded* dalam lapas bukan hal yang main-main.[2] Jumlah lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 525 yang mana dengan kapasitas 130.512 orang. Sedangkan berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

[2] *Ibid*., hlm. 103.

per bulan Juni 2021 penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 270,856 orang.[3] Hal tersebut mengakibatkan *extreme overcrowded* hingga 99%.

Sebenarnya kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang lazim, karena berasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak, dua diantaranya yaitu berhak memperoleh asimilasi dan integrasi yang mana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).[4]

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Lapas secara terbuka melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana tahap asimilasi. Sedangkan, Integrasi dimaknai sebagai hak narapidana mendapatkan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hak integrasi ini berupa pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Asimilasi dan Integrasi merupakan cara yang digaungkan untuk menindaklajuti kebijakan pemerintah dalam membebaskan dan mengeluarkan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Mengenai sistem pelaksanaan terkait dengan pembebasan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.[5]

Kebijakan yang memiliki tujuan baik serta dirasa menjadi stimulus seluruh elemen masyarakat ternyata mengakibatkan problem baru yaitu meningkatnya kriminalitas. Kasus kriminalitas ini meningkat sebanyak 10%. Pelaku kriminalitasnya beragam, mulai dari penjahat baru hingga seorang narapidana yang dibebaskan dari hukuman penjara berdasarkan program asimilasi dan hak integrasi

---

[3] Sistem Database Pemasyarakatan, Data Jumlah Penghuni Perkanwil per bulan Juni 2021, *http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly*, diakses 18 Juni 2021.
[4] Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
[5] Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *Jurnal Hukum Universitas YARSI*, Vol.8 No.1, 2017, hlm. 03.

pandemi covid-19. Seperti kasus yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Juni 2020, seseorang yang berinisial RIF yang merupakan mantan narapidana yang baru keluar dari penjara dengan program asimilasi, bersama rekannya CES alias Senut melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Aksi pencurian terjadi pukul 21.30 WIB. Sebelumnya pelaku sudah menyusun rencana untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Akibat perbuatannya tersebut RIF dan Rekannya ditangkap petugas kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku di jerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Tidak hanya di kota Semarang, kasus kriminalitas juga banyak terjadi diberbagai daerah Jawa tengah seperti Jepara, Kebumen, Sragen dan Solo pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi dengan berbagai kasus kejahatan.[6]

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Menurut Kartono (1999), kriminalitas adalah perbuatan melanggar hukum dan norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Selain itu, Kasus pengulangan tindak pidana yang terjadi dikenal merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan tertentu sejenis atau kejahatan kelompok, dengan memenuhi kriteria masing-masing jenis.[7] Berdasarkan ajaran islam sendiri tidak membenarkan adanya sebuah kejahatan terlebih pengulangan sebuah kejahatan. Sejatinya Allah swt menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, manusia juga diberikan kesempatan untuk menjaga kefitrahan dirinya. Namun tak memungkiri manusia dapat mengotori fitrah yang diberikan. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Asy-Syams [91]: 7-10.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰىهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكّٰىهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسّٰىهَا (١٠)

[6] Radar Semarang, *https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2020/06/17/baru-sebulan-keluar-penjara-napi-asimilasi-nekat-curi-motor/*, diakses pada 18 Oktober 2020.
[7] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2013, Edisi 3, hlm. 141.

Artinya : "*Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberikan ilham kepadanya berupa kedurhakaan dan ketaqwaan. Sungguh telah beruntunglah siapa yang telah mensucikannya. Dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya*"

Problem ini menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, pasalnya terjadi di masa paceklik akibat pandemi covid-19. Mandeknya roda perekonomian yang berimbas terhadap krisis ekonomi, penurunan pendapatan, bertambahnya angka kemiskinan, dan banyak pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia mencapai 6,88 juta orang selama pandemi berlangsung. Hal tersebut merupakan faktor pemicu seseorang untuk melakukan kejahatan, tak menutup kemungkinan seorang mantan narapidana yang belum habis masa tahananya tetapi dibebaskan dengan program asimilasi dan hak integrasi. Seorang narapidana yang bertahun-tahun di penjara dan sudah memiliki *basic* penjahat, kebal dengan penegak hukum (kepolisian), setelah keluar penjara pun tidak memiliki pekerjaan dan tidak tahu harus bagaimana untuk kelangsungan hidupnya juga menjadi faktor pendukung munculnya residivis.

Fenomena tersebut membuat masyarakat resah, gelisah dan cenderung merasa tidak aman dalam menjalankan kegiatannya. Bahkan, hal ini memicu munculnya *Fear of Crime*, istilah ini digunakan untuk seseorang memiliki rasa takut pada kejahatan. Jika berlebihan hal ini dapat menimbulkan *Generalized anxiety disorder* (GAD) atau gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, atau takut berlebihan.

Berdasarkan pemaparan diatas perlu adanya sebuah kajian ilmu untuk menganalisis pokok permasalahan yang terjadi sebagai langkah dalam menentukan dampak adanya kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi serta penyebab munculnya residivisme. Kajian ilmu yang digunakan penulis dalam hal ini yaitu ilmu kriminologi. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang artinya kejahatan dan "*Logos*" yang atinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1897), seorang ahli antropologi Prancis. Ruang lingkup kriminologi itu sendiri yaitu, mempelajari manusia jahat dari tingkah laku, karakter dan ciri-ciri tubuhnya, meneliti kejahatan

sebagai suatu gejala sosial, meneliti kejahatan dari sudut kejiwaannya, meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman, apakah penjahat yang dijatuhi hukuman sudah menjadi masyarakat yang baik atau malah melakukan kejahatan lagi.[8]

Dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang membebaskan narapidana sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena meningkatnya kriminalitas dan pengulangan tindak pidana, penelitian ini difokuskan untuk menggali dan mengkaji dampak kebijakan program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di tengah pandemi covid-19, serta menganalisis berdasarkan keilmuan kriminologi terhadap munculnya residivisme pasca adanya kebijakan yang membebaskan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi di masa pandemi.

Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif untuk mengkaji dampak yang timbul pasca kebijakan program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di masa pandemi Covid-19 berlaku serta menganalisis tinjuan kriminologi terhadap munculnya residivisme pasca dibebaskannya narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi di masa pandemi merupakan urgensi dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Kriminologi Tentang Implikasi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang".**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mengetahui kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.

[8] Syaiful Hidayatullah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Carok pada Saat Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura)", *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017, hlm. 14-15.

2. Mengetahui tinjauan kriminologi terhadap implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terkait kasus kriminalitas dan pengulangan terhadap tindak pidana yang terjadi pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi. Serta memberikan pengembangan dalam ilmu kriminologi terkait sifat dominan kejahatan yang dilakukan narapidana di masa pandemi covid-19 yang mana banyak pemicu untuk berbuat kejahatan.

2. Manfaat Praktis.

   a. Bagi Menteri Hukum dan HAM, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk membentuk regulasi atau peraturan maupun sebuah kebijakan yang realistis untuk kemaslahatan masyarakat serta dapat menjadi refrensi dalam membuat peraturan yang ideal mengenai pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di masa pandemi covid-19 serta sebagai saran dalam penguatan pengawasan narapidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi.

   b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti hukum pidana dan kriminologi untuk mengetahui konsep meningkatnya kasus kriminalitas.

   c. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai prilaku tindak kejahatan yang dapat muncul disekitarnya setiap saat.

   d. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi narapidana untuk mengevaluasi diri agar dapat menjadi sosok yang lebih baik pasca bebas dari tuntutan perampasan kemerdekaan.

E. Telaah Pustaka.

Mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

Abid Mansyurudin dalam Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian di Lapas Kelas II A Kabupaten Kendal Tahun 2016". Penelitian tersebut membahas tentang residivis pidana pencurian di Lapas kelas II A Kabupaten Kendal berdasarkan tinjauan hukum pidana islam. Selain itu, terdapat teori kriminologi mengenai sebab kejahatan dalam menjabarkan etiologi kriminal dan residivis. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, objek penelitian tersebut secara khusus membahas residivis pencurian sedangkan objek penelitian penulis narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana secara umum. Selain itu tinjauan dan tempat penelitiannya berbeda, yang mana penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum pidana islam sebagai fokus analisisnya dan tempat untuk penelitian di Lapas kelas II A Kabupaten Kendal, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan kriminologi sebagai fokus analisis dan tempat penelitiannya di Lapas kelas I Kedungpane Kota Semarang.[9]

Ahmad Syaifuddin dalam Tesis berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) dalam Proses Pembinaan Narapidana". Membahas tentang pembebasan bersyarat melalui syarat substansif dan administratif yang mana pelaksanaanya dilakukan secara online serta efektivitas prosedur pembebasan bersyarat untuk narapidana dan anak yang dilakukan secara online, studi kasus di lapas kelas IIA Kendal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah akibat kebijakan yang muncul dan studi kasusnya. Penelitian ini muncul karena adanya kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 01.PK.04-10 Tahun 2007, yang mana pembahasannya terkait efektivitas pembebasan bersyarat secara online (sistem database pemasyarakatan).

[9] Abid Mansyurudin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian di Lapas Kelas II A Kabupaten Kendal Tahun 2016", *Skripsi UIN Walisongo Librar*y, 2019.

Sedangkan skripsi penulis karena adanya kebijakan Menteri Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang diperpanjang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Jadi pembahasan skripsi penulis fokus pada adanya program asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana berdasarkan kajian ilmu kriminologi. Studi kasusnya pun berbeda, penelitian ini di lapas kelas IIA Kendal sedangkan studi kasus skripsi penulis di lapas kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.[10]

Mohamad Anwar dalam Jurnal Ilmiah berjudul "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona". Membahas mengenai aksi kriminalitas yang terjadi di masyarakat semenjak adanya covid-19 akibat diterapkannya program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tulisan ini fokus pada faktor penyebab dan pemicu terjadinya tingkat kriminalitas di tengah pandemi yaitu faktor ekonomi yang carut-marut. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dipungkiri akan terjadinya tingkat kriminalitas yang tinggi. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian dan hasil yang ingin dicapai. Fokus kajian skripsi penulis mengenai tinjauan kriminologi dari segi narapidana dan respon masyarakat. Hasil yang ingin dicapai dalam pembahasan jurnal ini yaitu mengetahui faktor penyebab tingginya kriminalitas sedangkan skripsi penulis hasil yang ingin dicapai yaitu mengetahui penyebab meningkatnya kriminalitas dan implikasi dari kebijakan asimilasi dan hak integrasi di masa pandemi covid-19.[11]

Ely Alawiyah Jufri dalam Jurnal Ilmiah berjudul "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta". Mengkaji pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun dalam pelaksanaannya tersebut terdapat kendala yang dihadapi baik dari segi aturan yang berlaku maupun bagi narapidana sendiri. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu

[10] Ahmad Syaifuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) dalam Proses Pembinaan Narapidana", *Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang*, 2019.
[11] Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Universitas Pemulang Banten: Jurnal 'Adalah*, Vol. 4, No. 1, 2020.

tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta yang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pasca adanya kebijakan yang dirasa kurang sesuai dengan realitas di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kriminologi dari segi narapidana. Studi kasus penelitian ini berada di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta sedangkan studi kasus skripsi saya berada di lapas kelas 1 Kedungpane Semarang. Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Sedangkan kebijakan yang digunakan dalam skripsi penulis yaitu kebijakan Menteri Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 yang diperpanjang melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.[12]

Andreas Eno Tirtakusuma dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)". Tulisan ini membahas mengenai akibat adanya kebijakan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Salah satu akibatnya yaitu menimbulkan kesenjangan terhadap putusan pengadilan yang mana mengurangi hukuman yang telah diputus oleh pengadilan, padahal dalam hal ini hakim pada saat menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis untuk menemukan hukuman yang adil bagi terdakwa. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu aspek pembahasan yang mana tulisan ini fokus mengenai eksekusi putusan pengadilan yang termodifikasi karena adanya kebijakan asimilasi dan integrasi di masa pandemi. Sedangkan penelitian penulis aspek pembahasannya terkait analisis kriminologi terhadap implikasi kebijakan asimilasi dan integrasi pada masa pandemi di lapas kelas 1 kedungpane Semarang.[13]

[12] Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *Jurnal Hukum Universitas YARSI*, Vol.8 No.1, 2017.
[13] Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)", *Universitas Pancasila: Jurnal SELISIK*, Vol. 6 No. 1, 2020.

F. Metode Peneitian.

Metode merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

   Penelitian kualitatif yang digunakan, masuk dalam jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan sebutan penelitian non-doktrinal. Penelitian lapangan sendiri dimulai dengan perumusan masalah yang tidak baku. Instrumen yang diguankan pun juga berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut dapat berkembang sesuai dengan kondisi di Lapangan. Penelitian non-doktrinal juga menekankan pada perubahan yang terjadi di masyarakat karena penerapan hukum yang ada tidak dapat berfungsi secara efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.[14]

2. Pendekatan Penelitian.

   Pendekatan di dalam penelitian hukum dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.[15] Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis melalui ilmu

[14] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok:Rajawali Pers, 2018, hlm. 139-140.
[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133.

kriminologi. Penelitian ini mneganalisis suatu kejahatan yang berkaitan dengan sebab-sebab kejahatan dan pengulangan kejahatan. Pendekatan kriminologi yang digunakan masuk dalam jenis pendekatan etiologis. Pendekatan etiologis sendiri yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual.

Dalam hal ini kaitannya dengan hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminil *(etiology of crime)*.

3. Sumber Data.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang mana berupa rekaman, pengamatan, wawancara, dan data hasil literasi. Sedangkan sumber data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dapat diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung bersama narapidana yang mendapatkan asimilasi atau hak integrasi pada pandemi Covid-19, pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang dan pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Data sekunder diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan segera.[16] Sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor 10

[16] Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit, hlm. 214.

Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang diganti dengan Peraturan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan mengalami perubahan beberapa pasal melalui Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 mengenai hal yang sama.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, berita, kamus, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan dengan berkomunikasi secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara bebas terstruktur. Maksud dari metode ini yaitu seluruh wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan lebih dahulu, selebihnya menyesuaikan

narasumber dalam menyampaikan penjelasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Wawancara dilakukan kepada narapidana yang dibebaskan karena mendapat program asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi namun melakukan pengulangan tindak pidana pasca dibebaskan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kepala Lapas I Kedungpane Semarang, Petugas Lapas dan masyarakat terdampak.[17]

b. Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik hukum. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah menggunakan dokumentasi yakni dengan menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[18]

5. Metode Analisis Data.

Data yang terkumpul selanjutnya diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara menggali nilai dan norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan maupun pengumpulan data angka, melainkan memusatkan perhatian untuk mengkaji perilaku-perilaku seseorang yang mengalami perubahan secara signifikan dan mengetahui gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.[19]

[17] *Ibid*, hlm. 228.
[18] *Ibid*, hlm. 217.
[19] *Ibid*, hlm 139.

G. Sistematika Penulisan Skripsi.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. BAB I : dalam BAB I ini berupa Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan sebagai acuan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran atau posisi objek yang diteliti, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. BAB II : dalam BAB II ini penulis menguraikan tinjauan umum. Uraian tersebut dibagi dalam beberapa sub pembahasan penelitian seperti, konsep dasar, pengertian dan ruang lingkup objek kajian serta memaparkan teori yang digunakan untuk penelitian sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.
3. BAB III : dalam BAB III ini penulis menguraikan tentang kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pendemi covid-19 di lapas kelas 1 Kedungpane Kota Semarang. Bab ini diuraikan ke dalam sub-sub bab pembahasan diantaranya, sistem program asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pendemi covid-19 di lapas kelas 1 kedungpane Kota Semarang, identifikasi pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19, dan relevansi kebijakan asimilasi dan hak integrasi di masa pendemi covid-19 terhadap kondisi narapidana.
4. BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian dimana penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam tinjauan kriminologi. Bab ini membahas mengenai tinjauan kriminologi tentang implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19 di lapas kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.
5. BAB V : dalam BAB V ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Kriminologi dan Teori Kejahatan.

1. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan.

Lahirnya kriminologi ditandai dengan lahirnya statistik kriminal dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* oleh Cesare Lomborso pada tahun 1876. Namun sejatinya jauh sebelum itu studi tentang kejahatan khususnya terkait dengan sebab-sebab kejahatan sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dengan filsuf Plato dan Aristoteles.[20] Istilah kriminologi pertama kali disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti Kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti Ilmu Pengetahuan. Sehingga, dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi itu sendiri dikembangkan pada akhir abad ke-18, ketika berbagai gerakan yang dijiwai kemanusiaan, mempertanyakan kekejaman, kesewenangwenangan, dan inefisiensi dari peradilan pidana dan sistem penjara.

Banyak pendapat yang disampaikan sarjana maupun ahli terkait dengan pengertian kriminologi, hal ini dipengaruhi oleh luasnya lingkup pembahasan kajian kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat berdasarkan berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan bahkan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan prilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian kriminologi menurut pendapat para ahli, diantaranya[21] :

a. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Gejala kejahatan seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti

[20] I.S.Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2011, hlm. 2.
[21] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, Lampung:CV Anugrah Utama Raharja, 2018, Cetakan Pertama, hlm. 3-5.

kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminil, dapat pula melihat sebab-sebab seorang melakukan kejhatan serta cara memperbaikinya.

b. Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressey merumuskan "*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It icludes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law ...* " yang mana kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.[22]

c. Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah menusia. Ilmu kriminologi belum termasuk ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan di sisi lain maslah manusia menunjukkan kejahatan sebagai gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, jadi kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia, agar kejahatan tersbeut jelas maka perlu memahami eksistensi manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dari segi orang melakukan kejahatan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan. Kriminologi mencakup tiga hal, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Seperti halnya yang telah dipaparkan di atas, bahwa kriminologi sangat erat kaitannya dengan kejahatan. Apabila berbicara mengenai kejahatan, maka perlu berbicara pula mengenai pelanggaran norma (Hukum Pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Sedangkan, dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang diputus oleh Pengadilan; Perilaku

[22] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 5-6.

yang perlu deskriminalisasi; Populasi pelaku yang ditahan; Perbuatan yang melanggar norma; Perbuatan yang mendapatkan reaksi sosial.

Secara etimologi, kejahatan berasal dari kata "jahat" yang mendapatkan imbuhan "ke-an". Jahat secara linguistik berarti "sangat jelek, buruk". Ketika mendapatkan imbuhan ke-an maka maknanya adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku menurut ketentuan yang disahkan oleh hukum tertulis.[23] Adapun rumusan kejahatan menurut para ahli kriminologi, diantaranya: W.A. Bonger menyatakan bahwa, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan. Sutherland menyatakan, kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. [24]

Kejahatan dalam pandangan islam sendiri lebih banyak diarahkan kepada tindakan-tindakan pidana yang diberikan hukuman yang biasa dipelajari melalui fiqh jinayah. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia. Kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina. Kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar. Kejahatan terhadap agama seperti murtad. Serta kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi. Al-quran menggambarkan kejahatan sebagai kerusakan serta menonjolkan sifat munafik sebagai bentuk tindakan merusak.[25] Sebagaimana yang telah tercantum dalam firman Allah swt (AL-Baqarah [2]: 12) sebagai berikut :

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢)

Artinya : "*Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar*"

[23] Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Hukum Diktum STAIN*, Vol.9 No.1, 2011, hlm. 15.
[24] Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 178-179.
[25] Muzdalifah Muhammadun, *Op. Cit.*, hlm. 15 dan 17.

2. Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan.

Dalam rangka mengetahui sebab musabab munculnya kejahatan perlu kita pelajari mengenai teori yang menjelaskan terkait hal tersebut. Adapun Teori Kriminologi Kontemporer mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, yaitu :

a. Teori *Differential Association* / Asosiasi Diferensial.

Pada hakikatnya teori ini lahir, tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930 dimana FBI (*Federal Bureau Investigation-Amerika Serikat*) memulai prosedur pelaporan tahunan kejahatan kepada polisi. Pertama kalinya, teori *Differential Association* dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology*, yang mana diperkenalkan kepada warga Amerika Serrikat. Sejatinya, asumsi dasar teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas, pengaruh aliran *Symbolic Interactionism* dari George Mead, Park dan Burgess dan aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay serta *Culture Conflict* dari Thorsten Sellin.[26]

Teori *Differential Association* terbagi dalam dua versi. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1939, versi kedua tahun 1947. Pada versi pertama Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Sutherland juga mendefinisikan *Differential Association* sebagai *"the contens of the patterns presented in association would differ from individual to indivuidual".* Hal ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang yang jahat. Pada versi keduanya Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.[27]

Jadi, menuurt teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Sedangkan yang dipelajari

[26] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 75.
[27] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 75.

dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan adanya alasan-alasan atau tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Menurut Sutherland, dalam teorinya *Differential Association*, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan, kelompok-kelompok, maupun budaya orang jahat.

Adapun postulat yang digunakan untuk menemukan sebab musabab kejahatan dari teori *Differential Association* adalah[28] :

1) Asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok;
2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, disebabkan karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibandingkan dari pola perilaku normal;
3) Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi dilakukan dengan proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok.

Dapat diatrik kesimpulan bahwa, Teori asosiasi diferensial merupakan teori pembelajaran atau "*learning to know*" yang mana sebuah teori yang mengajarkan proses keterampilan tentang cara belajar dan berfikir, ia tidak hanya sebatas materi akademis saja akan tetapi juga meliputi pemahaman akan diri sendiri dan orang lain, serta wawasan untuk belajar hidup dalam kebersamaan. Teori ini bersifat *open minded* orang yang akan melakukan kejahatan, ia tidak segan-segan dalam menerima informasi baru maupun ide atau gagasan yang berbeda. Tentunya ia menerima secara positif apa yang diterima dari hasil interaksi dengan penjahat (orang melakukan kejahatan).[29]

b. Teori Anomie.

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa aturan. Kata ini

[28] *Ibid*, hlm. 79.
[29] *Ibid*, hlm. 80.

berasal dari bahasa Yunani "*a*" berarti tanpa, dan "*nomos*" yang berarti hukum atau peraturan. Istilah tersebut diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* dalam masyarakat. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang lain dan masyarakat tanpa norma ini menimbulkan perilaku menyimpang (*deviate*).[30]

Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomi untuk menjelaskan perbuatan deviasi di amerika, tetapi konsep dari Merton berbeda dengan yang digunakan oleh Durkheim. Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis yaitu, tujuan sosial (*societea goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian anomie yaitu adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan dengan sarana yang tersedia. Teori anomie juga dapat terjadi karena perbedaan struktur kesempatan. Konsep anomie dapat digambarkan sebagai berikut[31] :

1) Dalam masyarakat terdapat tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan. Namun, faktanya tidak setiap individu dapat menggunakan sarana-sarana tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut.
2) Dimana dalam masyarakat terdapat struktur sosial berbentuk kelas-kelas. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).

[30] *Ibid*, hlm. 86.
[31] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 87-88.

Tidak seimbangnya sarana-sarana serta adanya perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustrasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep anomie adalah suatu keadaan dimana dalam masyarakat tidak adanya kesempatan dan perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai tujuan. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, terjadinya konflik, adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan, bahkan memicu seseorang untuk melakukan penyimpangan dari norma-norma yang berlaku.

Selain itu, Durkheim (1987) menggunakan konsep anomie untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat. Masyarakat telah melembaga suatu cita-cita (*goals*) untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin, karena pada umumnya dalam masyarakat tersebut kesuksesan diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Dalam rangka menggapai kesuksesan, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) yang harus ditempuh. Namun, faktanya tidak semua masyarakat menempuh dengan cara-cara yang dibenarkan, ada pula yang melalui cara melanggar undang-undang (*illegitimate means*). Umumnya yang menggunakan cara *illegitimate means* adalah masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas.[32]

c. Teori Kontrol Sosial.

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Teori ini dipelopori oleh Travis Hlrchi tahun 1969, dia mengatakan bahwa "pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu". Hal tersebut berarti setiap individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada

[32] *Ibid*, hlm. 96.

hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori kontrol sosial meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya adalah kelas bawah yang mana cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Apabila seseorang dekat dengan kelompok konvensional, maka kecenderungan menyimpang dari aturan kelompok sangat sedikit. Tetapi jika ada jarak sosial sebagai hasil putusnya ikatan, maka seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.[33]

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisi mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Albert J. Reiss Jr (1951) membedakan kontrol sosial menjadi dua macam, yaitu *personal control* dan *social control*. *personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. sedangkan, *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di mayarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian "*comitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan.[34]

F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul "*Family Relationsip an Delinquent Behavior*" tahun 1958, mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistik. Menurutnya kasus delinkuen disebabkan gabungan antara hasil

[33] *Ibid*, hlm. 102.
[34] *Ibid*, hlm. 103.

proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan yang dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah *delinkuen*, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya kejahatan. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Disamping itu, faktor internal dan eksternal harus kuat dan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari, adanya kontrol internal maupun eksternal; manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran; pentingnya proses sosialisasi, bahwa adanya sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen; dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan diharapkan remaja menaati hukum (*law abiding*).[35]

d. Teori Subculture.

Pada dasarnya, Teori Subculture menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Sebagai *social heritage*, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Kenakalan remaja adalah problem kelas bawah, serta *gang* adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori *subculture* sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (*intelectual heritage*) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*). Dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua Teori *Subculture*, yaitu[36]:

[35] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 104.
[36] Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 84.

1) *Deliquent Subculture*.

Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya delinquent boys (1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan subculture dimulai. Albert K. Cohen berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (*slum*). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan bahwa perilaku *delinkuen* di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi. Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya (*Status Frustration*) serta dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Konsekuensi dari konteks diatas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.

2) Teori *Diferential Opportunity*.

Teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja di Amerika dengan perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) tipe *gang* kenakalan Subculture, yaitu:

a) *Kriminal Subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, *gang* akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal *subculture* menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.

b) *Retreatist Subculture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya).

c) *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. *Gang subculture* demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang

bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perlikau menyimpang lainnya.

B. Konsep Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana.

1. Pengertian Asimilasi dan Hak Integrasi.

Asimilasi dan hak integrasi termasuk dalam program Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan dalam ketentuan Permenkumham sebagai upaya pemenuhan hak-hak narapidana selama hilang kemerdekaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Asimilasi adalah suatu proses pembinaan bagi narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkannya dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dapat pula diartikan sebagai proses membaurkan pelanggar hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar mereka dapat melebur dengan budaya kelompoknya, menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali.[37]

Sedangkan, pemberian hak integrasi dapat berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Permenkumham nomor 10 tahun 2020, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan sebuah program pembinaan dalam rangka mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tentunya kebijakan tersebut tidak diberikan begitu saja, narapidana perlu memenuhi persyaratan dan melakukan tata cara sesuai dengan prosedur apabila ingin mendapatkannya.[38]

Program asimilasi dan hak integrasi merupakan salah satu bentuk pencegahan dan penaggulangan virus corona dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dilakukan dengan tujuan menekan jumlah angka over kapasitas (*overcrowded*) narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki potensi tinggi cepatnya penularan virus covid-19. Selain itu, adanya program

[37] Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020, Pasal 1 ayat 3.
[38] *Ibid*, Pasal 1 ayat 5.

tersebut bertujuan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial kembali dalam masyarakat dengan lebih baik berdasarkan aturan yang berlaku, serta tidak menciptakan perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali.[39]

2. Kebijakan Permenkumham mengenai Program Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana Masa Pandemi Covid-19.

Sejatinya program asimilasi dan integrasi merupakan program yang selalu diberikan kepada narapidana dan anak setiap tahunnya dalam rangka memenuhi hak-haknya selama di Lembaga Pemasyarakatan, bahkan program ini termasuk ke dalam hak wajib yang harus diberikan kepada narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat. Namun diawal tahun 2020, seluruh penjuru dunia dikejutkan dengan penyebaran infeksi Covid-19 yang belum diketahui penyebabnya. Penyakit ini menular sangat cepat dan menyebabkan banyak kematian sehingga menjadi wabah. Mewabahnya Covid-19 terjadi karena adanya penularan melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Akibat wabah Covid-19 yang masuk hingga Negara Republik Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional.[40]

Urgensi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemasyarakatan berlandaskan atas dasar *problem over crowded* yang sejak dulu terjadi di lembaga pemasyarakatan. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai *overcrowded* di lapas, sehingga dapat dikatakan bahwa lapas merupakan tempat yang rawan akan penularan virus covid-19. Oleh karenanya, pemerintah pusat melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempercepat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka mengurangi penularan covid-19 di lingkungan pemasyarakatan.

---

[39] Yurike Violina dan Padmono Wibowo, "Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona 1", *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No.1, 2021, hlm 202-203

[40] *Ibid*, hlm. 201.

Percepatan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020. Peraturan Menteri tersebut berisi mengenai beberapa hal dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi seperti ketentuan umum, syarat, tata cara serta penetapan pemberian asimilasi dan hak integrasi. Namun, pada akhir tahun 2020 Menteri Hukum dan HAM memutuskan untuk memperpanjang program asimilasi dan hak integrasi sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dengan melengkapi dan mengubah beberapa substansi peraturan tersebut. Dilanjutkan dengan Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi, serta Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 tahun 2020 mengenai hal yang sama.

Pada tanggal 22 Desember 2020 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 resmi diperpanjang dan dituangkan melalui Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai gantinya. Dalam substansi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa poin penyempurnaan di antaranya, terkait syarat dan tata cara pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap Warga Negara Asing, serta penerbitan Surat Keputusan secara online, yang akan terakomodir dalam Sistem Database Pemasyarakatan. Ketentuan lain yang diubah yaitu mengenai pengecualian pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terkait narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi juga tidak diberikan kepada narapidana dengan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 31 Juni 2021 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 mengalami amandemen menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, yang mana amandemen tersebut hanya mengubah dua pasal saja diantaranya, Pasal 11 ayat (3) mengenai pengecualian pemberian asimilasi bagi narapidana dan Pasal 45 mengenai pemberlakuan asimilasi hanya bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Permenkumham tersebut masih berlaku hingga saat ini dalam rangka memperlambat penyebaran dan penularan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.[41]

3. Sistem Pemberian Asimilasi bagi Narapidana.

Program asimilasi hanya diberikan kepada narapidana maupun anak yang telah memenuhi syarat serta menjalankan mekanisme yang telah ditentukan. Ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana telah diatur dalam Bab II Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 sebagai langkah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan narapidana. Program asimilasi tersebut dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan Program Kerja Masyarakat (Pokmas). Namun, bagi narapidana warga negara asing, asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu berdasarkan usulan kedutaan besar atau penjamin warga negara asing dengan persetujuan, pembimbingan dan pengawasan Bapas. Kepala kantor Imigrasi juga melakukan pengawasan izin tinggal bagi narapidana warga negara asing. Adapun ketentuan dalam mendapatkan asimilasi, diantaranya:

a. Syarat pemberian asimilasi.[42]

Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat, yaitu:

1) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3) serta telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

[41] Permenkumham Nomor 24 tahun 2021
[42] Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Pasal 4 sampai Pasal 6, hlm. 6-9.

Apabila syarat pertama tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. Syarat pemberian asimilasi harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen, diantaranya:

1) petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
3) laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA, serta salinan register F dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
4) surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
5) surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan tidak terdapat penundaan proses perkara lain. Apabila tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi selama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, maka asimilasi tetap diberikan;
6) laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana;
7) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta sanggup membantu dalam

membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Bagi narapidana warga negara asing harus melampirkan dokumen tambahan, diantaranya: Surat jaminan dari Kedutaan Besar, Konsulat, atau Pejabat dan Penjamin WNA (Warga Negara Asing) tertunjuk yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi, tidak melakukan pelanggaran hukum, membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi, dan tidak menerbitkan paspor sampai narapidana dinyatakan bebas. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang menyatakan narapidana dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Serta surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

b. Tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana.[43]

Adapun tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana, yaitu sebagai berikut:

1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi. Pendataan dilakukan dengan menyeleksi syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan 7 (tujuh) hari setelah narapidana berada di Lapas. Kelengkapan dokumen tersebut harus dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas.
2) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat kepada Kepala Lapas. Kemudian Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi melalui surat keputusan. Pemberian asimilasi oleh Kepala Lapas dilakukan secara online melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem tersebut merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Apabila

[43] *Ibid*, Pasal 7 sampai Pasal 11, hlm. 10-12.

terkendala sistem jaringan maka Kepala Lapas dapat memberikan asimilasi secara manual dan mengirmkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah. Kemudian dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3) Keputusan pemberian asimilasi dapat dibatalkan oleh Kepala Lapas apabila ketika proses pemberian asimilasi, narapidana melakukan tindak pidana kembali, pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F, dan memiliki perkara lain.

Adanya sebuah pengeculian dalam memberikan asimilasi terhadap narapidana, membuat proses seleksi dan pengamatan sangat perlu diperhatikan. Adapun pengecualian pemberian asimilasi yaitu terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas; terorisme; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan hak asasi manusia yang berat; kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, kesusilaan Pasal 285 sampai dengan 290 KUHP, dan kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengecualian tersebut juga berlaku bagi narapidana yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

c. Pencabutan asimilasi bagi narapidana.[44]

Pemberian asimilasi sendiri dapat dicabut apabila narapidana melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus, diantaranya:

1) Terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka;

[44] *Ibid*, hlm. 12-14.

2) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang mana dengan dasar pengaduan dari masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
4) Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
5) Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
6) Serta tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran akan dibuatkan surat pemeriksaan. Pemerikasaan tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat perintah pemeriksaan diterbitkan. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Berdasarkan sidang tim pengamat pemasyarakatan, Kepala Bapas menyampaikan rekomendasi pencabutan asimilasi bagi narapidana kepada Kepala Lapas. Selanjutnya Kepala Lapas menetapkan keputusan pencabutan dan menyampaikannya kepada klien melalui Kepala Bapas dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal.

Narapidana yang dicabut hak asimilasinya dikategorikan telah melakukan pelanggaran berat dan akan diberikan sannksi berupa dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali, dan dapat pula tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam 1 (satu) tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

4. Sistem Pemberian Hak Integrasi bagi Narapidana.[45]

Pemberian hak integrasi bagi narapidana dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Hak Integrasi tersebut dapat berupa

[45] Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, Pasal 18 sampai dengan Pasal 45.

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang mana dilaksanakan melalui pembimbingan serta pengawasan Bapas dan Kejaksaan, juga dapat melibatkan Pokmas. Sistem pemberian hak integrasi telah diatur dalam Bab II Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, mulai dari Pasal 18 hingga Pasal 45. Adapun ketentuan dalam mendapatkan hak integrasi, dianataranya:

a. Syarat pemberian hak integrasi.

   Hak integrasi berupa pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:

   1) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
   2) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

   Sedangkan pemberian hak integrasi yang berupa cuti bersyarat harus memenuhi syarat:

   1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
   2) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
   3) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Apabila narapidana telah memenuhi syarat tersebut, maka harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa, petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; salinan register F dan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; surat pernyataan dari narapidana bahwa tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19; surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat

perkara lain dan tidak terdapat penundaan proses perkara lain; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; serta surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta sanggup membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program hak integrasi.

Terkait dengan hak integrasi bagi narapidana warga negara asing harus melampirkan dokumen, Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat dan Penjamin WNA (Warga Negara Asing) tertunjuk yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, mentaati persyaratan peaksanaan hak integrasi, tidak melakukan pelanggaran hukum, membantu mengawasi pelaksanaan hak integrasi, dan tidak menerbitkan paspor sampai narapidana dinyatakan bebas. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang menyatakan narapidana dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Serta surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam *Red Notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

b. Tata cara pemberian hak Integrasi.
    1) Pemberian hak integrasi dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem tersebut merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
    2) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang diusulkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat berdasarkan pertimbangan ketentuan syarat dan kelengkapan dokumen.
    3) Tim pengamat pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian hak integrasi bagi narapidana kepada Kepala Lapas/LPKA, kemudian Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usulan hak integrasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Setelah itu, Direktur Jenderal melakukan verifikasi dan menetapkan keputusan pemberian hak integrasi.
5) Keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Lapas/LPKA. Kemudian, Bapas mencetaknya dengan disertai tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

c. Pencabutan hak integrasi.

Pencabutan dilakukan dalam hal narapidana melanggar syarat umum dan khusus, diantaranya:

1) terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana;
2) menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3) menimbulkan keresahan dalam masyarakat berdasarkan hasil pengawasan oleh Pembimbing kemasyarakatan;
4) tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
5) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
6) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan/atau;
7) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

d. Mentoring dan evaluasi pemberian.

Kegiatan metoring dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, dengan membuat laporan serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Menteri. Direktur Jenderal juga melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap proses pemberian, pembatalan serta pencabutan asimilasi dan hak integrasi berupa pembebasan

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat melalui sistem informasi pemasyarakatan.

C. Pengertian Narapidana dan Penggolongannya.

1. Pengertian Narapidana.

Narapidana berasal dari dua kata yaitu nara dan pidana, "*nara*" adalah bahasa Sansekerta yang berarti kaum atau orang-orang, Sedangkan "*pidana*" berasal dari bahasa Belanda "*Straaf*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.[46] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara gamblang mendefinisikan narapidana, namun dalam Pasal 1 angka 32 KUHAP menjelaskan mengenai definisi terpidana. Terpidana merupakan seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[47] Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, juga menjelaskan hal yang sama mengenai definisi terpidana. Penjelasan lebih gamblang mengenai definisi narapidana tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.[48] Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 tahun 2020 Pasal 1 ayat 1, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara, orang hukuman atau orang terpenjara. Dalam *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;

[46] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[47] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Cetakan ke-12, Jakarta:Sinar Grafika, 2019, hlm. 9.
[48] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

b. Orang yang ditahan buat sementara;
c. Orang di sel;
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.[49]

Di samping itu terdapat pula pendapat para ahli mengenai definisi narapidana diantaranya, C. L. Harsono dalam bukunya yang berjudul "Sistem Baru Pembinaan Narapidana", mengatakan bahwa narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Wilson (2014), narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat. Sedangkan narapidana merupakan seorang manusia yang karena melanggar norma hukum, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.[50] Dengan demikian, pernyataan di dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang kemerdekaannya hilang sementara akibat dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim karena terbukti melanggar norma hukum yang ada, sehingga harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi *declaration of human right* sudah seharusnya mengayomi hak-hak warga negara termasuk narapidana. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Pasal 10, menyatakan bahwa macam-macam hukuman terdiri dari: (1) Pidana pokok seperti, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. (2) Pidana tambahan seperti, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut jelas menegaskan

[49] Wahdanigsi, "Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sijai", *Universitas Hasanuddin Makasar*, 2015, hlm. 10.
[50] Ratri Ariestya Praviyanti, "Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapat Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)", Skripsi, *UMM Library*, 2018, hlm. 15.

meskipun narapidana termasuk seseorang yang di pidana karena melanggar hukum namun hanya hak-hak tertentu saja yang dicabut. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap memiliki hak yang sama meskipun sebagian dari haknya sementara dirampas oleh negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Konsep hak memiliki dua pengertian dasar yaitu, pertama hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut meliputi hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan tujuannya untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat, baik secara nasional maupun internasional.

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganut prinsip bahwa tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadinya sebagai manusia. Oleh karena itu, adanya peraturan mengenai hak-hak narapidana berdasarkan hukum positif Indonesia yang telah tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi, narapidana berhak[51] :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

[51] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14.

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hak-hak narapidana yang harus dipenuhi terdapat pula kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, berbunyi bahwa setiap narapidana atau tahanan wajib[52] :

a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

2. Penggolongan Narapidana.

Adapun penggolongan narapidana telah tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;

[52] Permenkumham RI Nomor 6 tahun 2013, Pasal 3.

d. Jenis kejahatan; dan

e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penggolongan tersebut sangat diperlukan baik dilihat dari segi keamanan maupun pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi narapidana lain. Penggolongan umur bermaksud agar penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya diklasifikasi atas dasar usia yang tidak jauh berbeda, misalnya lapas anak, lapas pemuda, lapas dewasa. Sedangkan penggolongan jenis kelamin yaitu penetapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara lapas laki-laki dan lapas wanita.

Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas lima tahun.[53]

D. Lembaga Pemasyarakatan dan Refleksi Pembinaannya.

1. Lembaga Pemasyarakatan.

Ide Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan oleh DR. Saharjo, S.H pada tanggal 5 Juli 1963. Konsep pemasyarakatan merupakan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum istilah pemasyarakatan dikenal, masyarakat lebih mengenal istilah penjara karena sering digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Penjara itu sendiri berasal dari bahasa jawa "*penjoro*" yang berarti tobat atau jera. Jadi, dapat diartikan penjara adalah tempat yang digunakan untuk tobat dan membuat seseorang menjadi jera. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara adalah dia yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan terbukti melanggar hukum sehingga hak kebebasannya dalam masyarakat dicabut.[54] Penjara merupakan tempat atau wadah pelaksanaan pidana penjara berupa rumah yang

[53] Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Gadjah Mada*, Vol. 09, No.01, 2015, hlm. 57.
[54] A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung:Lubuk Agung, Cetakan 2, 2018, hlm. 04.

digunakan bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Kini istilah Penjara tidak lagi digunakan untuk menyebut tempat seseorang menjalani hukuman melainkan diganti dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan setelah dikenalnya ide Pemasyarakatan di Indonesia. Namun, kata Penjara masih digunakan sebagai nama hukuman bagi pelaku tindak pidana yang termasuk dalam pidana pokok. Seiring dengan pergantian istilah diganti pula sistem pembinaannya dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan sebuah institusi korektif sebagai bagian akhir dari sebuah sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menjunjung tinggi nilai keadilan dengan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dan orang yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[55] Lapas adalah tempat memproses maupun memperbaiki seseorang (*people processing organization*), yang mana subjeknya adalah manusia yang dilabelkan sebagai "Penjahat". Lapas sebagai *people processing organization* tidak memiliki hak untuk menyeleksi seorang individu yang akan masuk kedalamnya, hal ini lah yang membedakan Lapas dengan institusi lainnya.[56] Dasar hukum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang berbunyi bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan".

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulanginya tindak pidana yang dilakukan oleh WBP, serta merupakan penerapan dan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan, yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

[55] Resti Arnev, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang", *e-Skripsi Universitas Andalas*, 2017, Bab I, hlm. 01.
[56] *Ibid*, hlm. 14.

adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan (anak pidana, anak negara, anak sipil) dan klien pemasyarakatan.[57]

Tugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri dapat dikatakan cukup berat, karena sasaran keberhasilannya mengubah seorang narapidana menjadi manusia yang dapat menyadari kesalahan serta dapat memperbaiki kualitas dan karakteristik dirinya sendiri. Adapun tugas-tugas lembaga pemasyarakatan yaitu sebagai berikut[58] :

a. Melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan tertinggi karena diberikan anugerah akal dan pikiran. Maka, narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan diperlakukan selayaknya manusia dengan menerima pembinaan dan bimbingan agar dapat menyesali perbuatan sebagai langkah memperbiki kualitas diri. Dalam mewujudkan proses pembinaan yang sempurna, perlu adanya strategi pembinaan yang tepat bagi narapidana.
b. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana dan anak didik. Pembinaan mengenai kesadaran beragama sangat diperlukan sebagai peneguhan iman agar warga binaan dapat menyadari akibat perbuatan yang salah. Pembinaan ini dilakukan melalui konsultasi maupun siraman rohani dengan tokoh agama berdasarkan keyakinan masing-masing.
c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja. Wujud pembimbingan yang diberikan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan klien, dapat pula diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan bertugas memberikan sarana dan pelatihan sesuai bakat narapidana untuk meningkatkan ketrampilan narapidana. Pelatihan tersebut termasuk pembinaan kemandirian dan kerja produktif yang diawasi oleh bagian sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja.

[57] Andhika Rahmad, Amalia Diamantina, dan Lita Tyesta, "Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3, 2016, hlm. 6.
[58] *Ibid*, hlm. 7-10.

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Suasana yang aman dan tertib memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas umum. Lapas menyediakan norma, kebiasaan, dan perturan yang harus ditaati oleh semua narapidana.

Selain tugas yang diemban, lembaga pemasyarakatan juga memiliki kewenangan untuk membantu mengarahkan narapidana dalam mentaati semua peraturan dan bertindak berdasarkan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman. Agar penerapan kewenangan lapas dapat berjalan dengan efektif, maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan narapidana. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para WBP dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang diperbuat dan tidak akan mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial, dan dapat hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.[59]

2. Refleksi Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem atau landasan dalam rangka memperlakukan maupun membimbing narapidana agar lebih berdaya guna ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dahulu pembinaan di Lapas menggunakan sistem kepenjaraan dengan berlandaskan pada *reglement penjara*. Sistem tersebut menekankan konsep *security approach* yang mana di dalamnya terdapat unsur balas dendam dan penjeraan disertai dengan bangunan tembok seram. Penghukuman melalui sistem kepenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana guna memperbaiki hidupnya. Namun, setelah dikenalnya ide pemasyarakatan di Indonesia, pada tahun 1964 pembinaan terhadap pelaku kejahatan atau narapidana diganti dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Gagasan saharjo mengenai sistem pemasyarakatan, sebelumnya telah dirumuskan dalam 10 prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, sebagai berikut[60] :

[59] *Ibid*, hlm. 11.
[60] A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 12.

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3) Rasa obat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila;
8) Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10) Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa “Sistem Pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterma kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab"[61]. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka. Selain itu, adapula tujuan re-integrasi sosial yang dicapai dengan titik arah dan tata cara perlakuan untuk mencapai kesatuan hubungan antara pelanggar hukum, masyarakat, dan institusi untuk mengusahakan pulihnya narapidana.

Sistem pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Namun, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan diantaranya :

a. Pengayoman;
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. Pendidikan;
d. Pembimbingan;
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut agar narapidana menjadi warga yang baik setelah keluar dari penjara.[62]

Pembinaan narapidana yang dilakukan tidak hanya pembinaan secara mental-spiritual berupa pembinaan kemandirian saja, tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan berupa pembinaan ketrampilan. Pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* artinya pembinaan yang dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan

[61] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.
[62] Resti Arnev, *Op. Cit.*, hlm. 02.

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Pelaksanaannya meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan, *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lapas, meliputi pemberian asimilasi dan hak integrasi.[63]

Upaya pembinaan yang telah dilakukan haruslah didukung dengan sarana dan prasarana memadai, yang meliputi[64] :

1) Sarana Gedung Pemasyarakatan. Gedung Pemasyarakatan menajdi gambaran keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan sesuai harapan. Di Indonesia, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan adalah warisan kolonial yang kesan angker dan keras dengan dikelilingi tembok tinggi dan tralis besi.
2) Pembinaan Narapidana. Sarana pendidikan ketrampilan di Lapas sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Bahkan terdapat sarana yang sudah lama tidak berfungsi lagi, namun masih digunakan.
3) Petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Petugas pembinaan Lapas belum sepenuhnya menunjang tercapainya profesionalitas pembinaan. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar petugas pembinaan narapidana belum dibekali kecakapan pendekatan humanis yang menyentuh perasaan para narapidana.

E. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*" dalam bahasa Belanda yang artinya "Tindak Pidana". Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Tindak pidana sendiri merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Namun, di Indonesia sendiri

[63] A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 13.
[64] Dina Damayanti, "Profesionalisme Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Wirogunan Yogyakarta", *Skripsi, Yogyakarta:UANY Library*, 2011, hlm. 4.

terdapat istilah lain tindak pidana yang mana terdapat dalam buku maupun peraturan tertulis diantaranya[65] :

a. Peristiwa pidana
b. Perbuatan pidana
c. Pelanggaran pidana
d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
e. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan istilah yang tersebut di atas, pembentukan undang-undang sekarang tetap dalam pemakaian istilah "Tindak Pidana". Akan tetapi para sarjana hukum pidana tetap mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri.

Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*). Secara yuridis formal, tindak kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Adapun pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut ahli dan para sarjana yaitu[66] :

a. D. Simons.

   Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

   1) perbuatan manusia;
   2) diancam dengan pidana;
   3) melawan hukum;
   4) dilakukan dengan kesalahan;
   5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Van Hamel.

   Sependapat dengan simons namun hanya menambahkan sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum. Dengan unsur-unsur, perbuatan manusia

[65] Giorga Argenta, "Kriteria Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019, hlm. 9.
[66] Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang:Yayasan Sudarto, 2018, cetakan ke-5, hlm. 50-55.

yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut di pidana.

c. Wirjono prodjodikoro, mengemukakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
d. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.
e. Moeljatno, mengartikan "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut. Unsurnya perbuatan, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (diancam pidana), bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
f. R. Tresna, berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.

Pengulangan tindak pidana atau kejahatan lebih dikenal dengan istilah "Residiv". Residiv atau pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*In kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Berdasarkan sifatnya residiv dibagi menjadi dua sistem pemberatan pidana, yaitu[67] :

a. Residiv umum. Dalam sistem ini, pengulangan tindak pidana yang dilakukan tidak terbatas oleh kategori tindak pidana apapun dan dapat dilakukan dalam waktu kapan saja. Jadi, dalam residiv umum ini tidak ditentukan tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangannya. Oleh karena itu, residiv umum tidak ada daluwarsa residiv.
b. Residiv khusus. Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan pada janis tindak pidana tertentu dan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Regulasi hukum di Indonesia menganut sistem residiv khusus, maka pengulangan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[67] Muhammad Wahyu Darmasnya, "Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014", Library *UIN Alauddin Makassar*, 2014, hlm. 9-11.

hanyalah kejahatan-kejahatan tertentu saja. Adapun jenis-jenis pengulangan tindak pidana atau residiv kejahatan berdasarkan KUHP, yaitu[68] :

a. Residiv kejahatan tertentu sejenis.

   Residiv jenis ini, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu, antara kejahatan yang terdahulu dengan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan yang dilakukan dalam waktu tertentu yaitu 2 tahun sejak adanya putusan Hakim yang tetap (untuk delik dalam Pasal 137, 144, 208, 216, 303, bis dan 321) dan 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik dalam Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393). Kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam kategori jenis ini ada sebelas Pasal dalam Buku II KUHP, diantaranya : Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303 bis (2).[69]

b. Residiv kejahatan kelompok jenis.

   Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis ini diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Adapun persyaratan residiv menurut ketentuan dalam pasal tersebut, yaitu:

   1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam kelompok jenis. Adapun yang termasuk dalam kelompok jenis, yaitu[70]:

      a) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang (Pasal 244-248), pemalsuan surat (Pasal 263-264), pencurian (Pasal 362, 363, 365), pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369). Penggelapan (Pasal 372, 374, 375), penipuan (Pasal 378), kejahtan jabatan (Pasal 415, 417, 425, 432), penadahan (Pasal 480, 481).

      b) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (Pasal 131, 140, 141), pembunuhan biasa dan berencana (Pasal 338, 339, 340), pembunuhan anak (341, 348), penganiayaan biasa/berat

[68] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012, Cetakan ke-IV, hlm. 110-111.
[69] *Ibid*, hlm. 112.
[70] *Ibid*, hlm. 114.

dan penganiayaan berencana (Pasal 351, 353, 354, 355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438-443), dan insubordinasi (Pasal 459-460).

c) Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan, misalnya pengihnaan terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 134-137), penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal 142-144), penghinaan terhadap penguasa/badan umum (Pasal 207, 208), penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310-321), dan kejahatan penerbitan/percetakan (Pasal 483, 484).

2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap.
3) Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.
4) Melakukan pengulangan dengan tenggang waktu belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan.[71]

[71] *Ibid*, hlm. 117-118.

BAB III

KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG

A. Sistem Program Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana Pada Masa Pendemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.

Program asimilasi dan hak integrasi merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak narapidana. Sejatinya, pemberian asimilasi dan hak integrasi sudah berlaku sebelum adanya pandemi. Namun, pada tahun 2020 tepatnya ketika masa pandemi Covid-19, Kemenkumham mempercepat pemberlakukan program asimilasi dan hak integrasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020.

Setelah itu, direalisasikan melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai dasar menjalankan asimilasi dan hak integrasi. Kemudian, regulasi tersebut diperpanjang dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Namun, mengalami perubahan lagi pada bagian tertentu yang dituangkan dalam Permenkumham Nomor 24 tahun 2021. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dipercepatnya kebijakan asimilasi dan hak integrasi, yaitu sebagai upaya mengurangi problem overkapasitas lapas serta pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.[72]

Overkapasitas lapas diartikan sebagai tingkat kepadatan hunian dan kapasitas resmi penjara, kepadatan hunian itu sendiri diartikan sebagai situasi di mana jumlah tahanan melebihi kapasitas resmi penjara. Kondisi kepenuhsesakan penghuni lapas dan rutan sudah terjadi sejak tahun 1859. Overkapasitas memiliki dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak narapidana dan tahanan seperti: pengaturan pengelolaan lapas yang kurang maksimal, kemunduran kondisi kehidupan narapidana, kurangnya akses mengikuti pendidikan, pelatihan dan pekerjaan, menurunnya kualitas kesehatan fisik dan mental yang memicu terjadinya ketegangan dan kekerasan, serta meningkatkan risiko penularan penyakit.

[72] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021.

Overkapasitas Lapas dan Rutan di Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tidak diikuti oleh penambahan ruang dan daya tampung hunian. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) dibandingkan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia tahun 2018 sampai dengan Oktober 2021:

Tabel 3.1

Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana pada Lapas dan Rutan di Indonesia Tahun 2018 - Oktober 2021

No	Tahun	Jumlah Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	Kapasitas Hunian	Persentase Overcrowding
1.	2018	255,380 Juta	135,561 Juta	88%
2.	2019	265,648 Juta	135,561 Juta	96%
3.	2020	249,139 Juta	135,561 Juta	84%
4.	2021	266,546 Juta	135,561 Juta	97%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan.

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia. Adanya persentase overkapasitas yang meningkat pada tahun 2019 dan 2021, naik turunnya jumlah tahanan dan narapidana akibat pelaku kejahatan mengalami penambahan lebih banyak dari pada pengurangan tahanan dan narapidana. Begitu pula sebaliknya ketika mengalami pengurangan.[73]

Keinginan Negara dalam menggunakan pidana penjara sebagai penaggulangan kejahatan tidak selalu menimbulkan dampak yang baik. Penggunaan kebijakan hukum pidana justru menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan umum dan cenderung mengarah pada *overkriminalisasi*. Penggunaan hukum pidana secara berlebihan sejatinya bertolak belakang dengan sifat hukum pidana itu sendiri sebagai *ultimum remedium* (langkah terakhir). Adanya *overkriminalisasi* dapat pula menimbulkan *overpunishment* karena penggunaan hukum pidana akan meningkatkan penjatuhan sanksi pidana oleh

[73] Sistem Database Pemasyarakatan, *http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly*, diakses pada 19 Oktober 2021

Pengadilan. *Overpunishment* tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah warga binaan, sehingga menimbulkan permasalahan *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan.

Problem overkapasitas lembaga pemasyarakatan belum usai, muncul problem baru di Indonesia yaitu muncul wabah penyakit akibat virus di kota Wuhan, Tiongkok. Virus tersebut bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2). Pandemi Covid-19 ini memiliki dampak yang signifikan mulai dari bidang sosial (adanya pembatasan aktivitas masayarakat), bidang ekonomi (banyaknya perusahaan dan umkm yang dihentikan sementara), bahkan di bidang hukum terkait dengan penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut bukan tanpa dasar, sejatinya Lapas yang overkapasitas berpotensi besar dalam penularan Covid-19 sehingga, perlu langkah tepat dalam mengatasinya.[74]

Sistem pemberian asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 tentu berbeda dengan sebelumnya. Saat ini semua sistem dilakukan secara daring (*online*). Adapun implementasi proses pemberian asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, yaitu: Pihak lapas melakukan sosialisai kepada warga binaan mengenai program asimilasi dan hak integrasi, sosialisai ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait hak-hak yang didapatkan narapidana serta memberitahu alur pemenuhan haknya. Pihak lapas juga menginformasikan program asimilasi dan hak integrasi melalui sosial media instagram.[75]

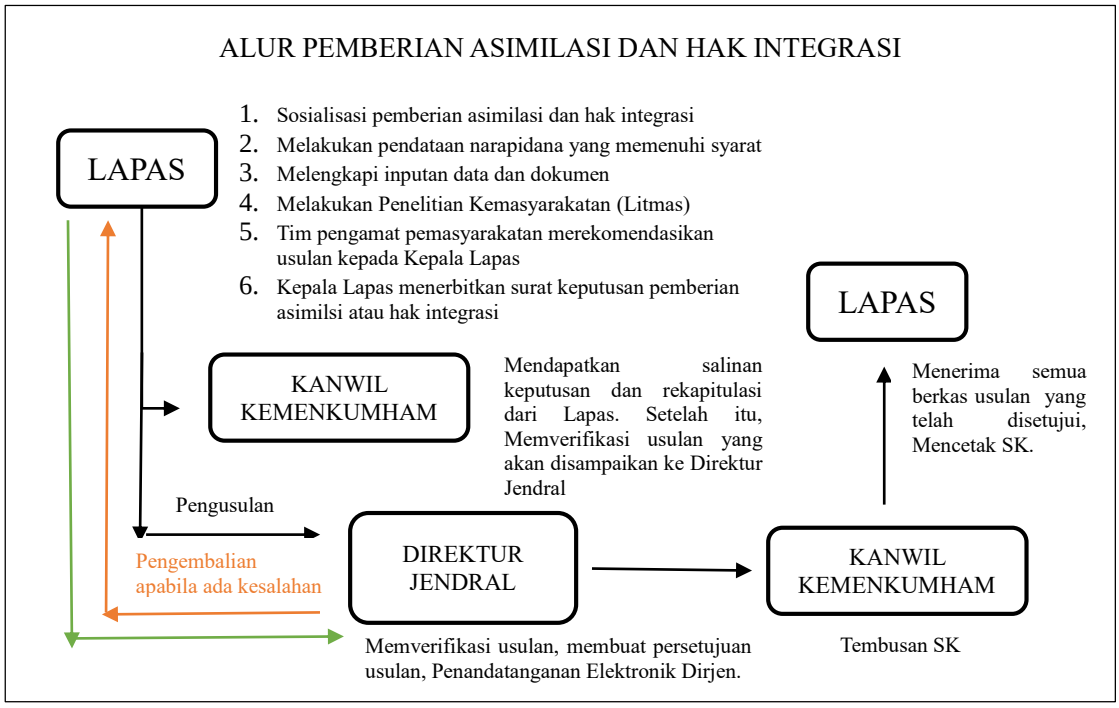
Pemberlakuan asimilasi dan hak integrasi di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang tentu berbeda. Asimilasi diberlakukan melalui proses pembinaan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Narapidana menjalankan sisa masa tahanan di Rumah masing-masing namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan Bapas. Asimilasi diberikan apabila narapidana telah menjalankan ½ dari masa pidananya. Apabila sudah mencapai 2/3 maka dapat mengajukan bebas melalui hak integrasi. Hak integritas sendiri berupa

[74] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021.
[75] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang dilaksanakan dengan pembimbingan serta pengawasan Bapas dan Kejaksaan. Hak integrasi diberikan apabila narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan asimilasi atau hak integrasi sesuai dengan Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020.[76]

Asimilasi dan hak integrasi hanya diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu saja. Narapidana yang tidak dapat diberikan program asimilasi dan hak interasi yaitu narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika diatas 5 tahun, tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, serta ketentuan lain yang diatur dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020.

Setelah narapidana memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, selanjutnya narapidana mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, sebagai berikut[77]:



[76] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[77] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Keterangan :

1. Pihak UPT atau Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang melakukan pendataan narapidana, kemudian melengkapi inputan data dan dokumen melalui sistem informasi pemasyarakatan. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, kelengkapan dokumen pemberian asimilasi, yaitu:
   a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
   b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
   c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA, serta salinan register F dan salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
   d. surat pernyataan dari Narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
   e. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan tidak terdapat penundaan proses perkara lain. Apabila tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi selama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, maka asimilasi tetap diberikan;
   f. laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas yang memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana;
   g. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga atau wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta sanggup membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

   Sedangkan, kelengkapan dokumen pemberian hak integrasi, yaitu : petikan

putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA; salinan register F dan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA; surat pernyataan dari narapidana bahwa tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19; surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan tidak terdapat penundaan proses perkara lain; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; serta surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta sanggup membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program hak integrasi.

Setelah melakukan verifikasi data, pihak bapas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) berupa survei ke rumah narapidana untuk memastikan narapidana tersebut layak atau tidak mendapatkan program asimilasi. Selanjutnya Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan narapidana yang memenuhi syarat kepada Kepala Lapas. Setelah disetujui, UPT mengupload surat pengantar dan mengirimkan semua berkas tembusan usulan kepada kanwil.

2. Kanwil bertugas melakukan verifikasi tembusan usulan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Hasil verifikasi akan diberikan kepada DITJEN PAS atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. DITJEN PAS akan melakukan verifikasi usulan tersebut, membuat persetujuan, menetapkan surat keputusan dengan penandatanganan elektronik. Apabila Direktur Jendral meminta perbaikan, maka dikembalikan ke Lapas. Pihak lapas diberikan waktu maksimal 3 hari untuk mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan.
4. Kembali ke UPT, yang mana setelah itu keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Bapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan Kepala Kanwil dan Kepala Lapas. Kemudian, Bapas mencetaknya

dengan disertai tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri

Kelengkapan berkas administrasi dan pendaftaran dilakukan oleh narapidana sendiri dengan bantuan pihak lapas melalui sistem online. Pihak keluarga narapidana ikut membantu terkait dengan surat jaminan dari keluarga. Namun berkas yang berkaitan dengan pihak keluarga narapidana dilakukan pada bagian administrasi di luar gedung Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang.

Ketika Kebijaka mengenai program asimilasi dan hak integrasi diberlakukan, banyak narapidana yang sudah mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Berdasarkan data dari Kemenkumham Jateng, jumlah Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak intgrasi pada masa pandemi Covid-19 April tahun 2020 hingga Oktober tahun 2021 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, sebagai berikut[78]:

Tabel 3.2

Jumlah Narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak intgrasi di Lapas Kedungpane Semarang pada masa pandemi Covid-19 (April 2020 sampai dengan Oktober 2021)

No	Bulan/Tahun	Asimilasi	Hak Integrasi
1.	Bulan April – Desember 2020	213 Orang	240 Orang
2.	Bulan Januari – Oktober 2021	310 Orang	292 Orang

Berdasarkan data tersebut, terlihat jumlah pemberian asimilasi dan hak integrasi meningkat. Pada tahun 2020 program asimilasi diberikan pada 213 Narapidana, hal tersebut meningkat pada tahun 2021 yang mana program asimilasi diberikan kepada 310 Narapidana. Begitu pula dengan program hak integrasi yang mana pada tahun 2020 diberikan pada 240 Narapidana, sedangkan pada tahun 2021 diberikan pada 292 Narapidana.

Dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana itu sendiri tidak ada prioritas khusus. Apabila narapidana yang melakukan tindak pidana diluar pengecualian untuk mendapatkan hak tersebut berdasarkan Permenkumham, maka diperbolehkan untuk mengajukan haknya. Terkait dengan

[78] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021

proses klasifikasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, salah satunya narapidana sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya terhitung sampai akhir tahun 2021.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, pemberian asimilasi dan hak integrasi dapat dicabut, apabila narapidana :

1. Terlibat pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka atau melakukan pengulangan tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat didasarkan oleh pengaduan masyarakat yang diklarifikasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas;
5. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
6. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing.

Narapidana yang haknya dicabut karena melakukan pelanggaran berat akan diberikan sanksi berupa:

1. Dimasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari;
2. Pencabutan atas pelanggaran syarat umum pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
3. Pencabutan atas pelanggaran syarat khusus pertama kalinya, tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
4. Pencabutan atas pelanggaran syarat umum atau khusus kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat;
5. Terhitung sejak pencabutan maka lama masa menjalankan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai menjalani masa pidananya.

Pembatalan pemberian asimilasi dan hak integrasi diajukan oleh pembimbing kemasyarakatan yang diajukan ke Bapas dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Bapas akan menindaklanjuti dengan mengadakan sidang tim pengamat, apabila terbukti maka usulan pencabutan akan diserahkan kepada Direktur Jendral. Apabila telah disetujui maka Direktur Jendral akan mengirim surat pencabutan kepada Bapas untuk diserahkan kepada narapidana.

B. Identifikasi Pasca Penerapan Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Terhadap Narapidana Pada Masa Pendemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.

Setiap kebijakan dari pemerintahan tentu tidak akan pernah terbebas dari sorotan publik. Salah satu sorotan tersebut tertuju pada pasca penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana pada masa pandemi covid-19. Asimilasi dan hak integrasi itu sendiri dikategorikan sebagai tahapan pemasyarakatan. Sebagaimana pengertian asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan asimilasi, hak integrasi merupakan bagian dari pembebasan bersyarat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 berbunyi bahwa “pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan penulis dari beberapa narasumber, kebijakan asimilasi dan hak integrasi yang diterapkan pada masa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang signifikan pasca penerapannya. Pembahasan pada sub bab ini penulis akan mengklasifikasikan hasil identifikasi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pendemi covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang. Adapun dampak positif yang timbul pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi, yaitu :

Pertama, mengurangi problem *overcrowded* di Lapas, sehingga *social*

distancing dapat dilakukan di lapas[79]. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa problematika overkapasitas di Lapas bukan sesuatu hal yang baru. Masalah ini terjadi sejak dahulu yang belum dapat diatasi oleh Negara. Wilayah Jawa Tengah khususnya di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang juga mengalami peningkatan jumlah tahanan dan narapidana. Berdasarkan database dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada tahun 2020 jumlah tahanan dan narapidana Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang mencapai 1.786 jiwa dengan rincian 1.420 narapidana dan 366 tahanan. Sedangkan, kapasitas hunian lapas hanya 663 jiwa. Overkapasitas di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang mencapai 168,78%. Data tersebut sangat jelas memperlihatkan problematika *overcrowded* hunian yang terjadi di Indonesia.

Pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi diterapkan terjadi pengurangan jumlah narapidana di Lapas. Data terkahir pada bulan Oktober tahun 2021 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang, jumlah narapidana dan tahanan mencapai 1.756 jiwa dengan rincian 1.101 narapidana dan 655 tahanan. Apabila dibandingkan secara keseluruhan maka, jumlah penghuni lapas hanya berkurang 30 jiwa. Jika dipresentasekan hanya berkurang 2% dari total keseluruhan. Tetapi untuk narapidana sendiri berkurang 319 jiwa dengan presentase pengurangan mencapai 23%. [80]

Berdasarkan analisis penulis, pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran covid-19 di tengah problem *overcrowded* merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab overkapasitas lapas yaitu karena kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.

[79] Fajar Sodiq, *Wawancara,* Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[80] Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah, Rekapitulasi Asimilasi Rumah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19, diberikan pada 25 Oktober 2021.

Kedua, Angka penyebaran dan penularan Covid-19 di Lapas berkurang. Sebelumnya di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang pernah terjadi kasus penularan Covid-19, yang mana hampir menyerang seluruh elemen dalam lapas seperti narapidana, tahanan, petugas lapas, bahkan staf administrasi lapas. *Ketiga*, kebijakan ini dianggap efektif karena narapidana bisa mendapatkan haknya serta dapat berbaur kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pendukung karena narapidana dianggap telah memiliki kesiapan dengan bekal yang mencukupi dari lapas seperti pembinaan keterampilan atau keahlian khusus, siraman rohani, upacara bendera, sosialisasi hukum dan psikologi, dan lain sebagainya.[81]

Selain itu, adapun dampak negatif yang timbul pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang, yaitu meningkatnya kasus kriminalitas, terjadinya pelanggaran asimilasi dan hak integrasi (narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana), dan lemahnya sistem pengawasan pasca pemberian asimilasi dan hak integrasi.

Berdasarkan data dari Polisi Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, terjadi peningkatan jumlah kasus kriminalitas dari sebelum pandemi dengan sesudah pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 atau sebelum pandemi mencapai 1.258 jumlah tindak pidana, sedangkan pada tahun 2020 – Oktokber 2021 mencapai 1.562 jumlah tindak pidana.[82] Meningkatnya kasus kriminalitas merupakan salah satu dampak pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana. Hal tersebut dapat terjadi karena sebelumnya tidak ada sortir dalam pemberian asimilasi dan hak integrasi, semua narapidana yang memenuhi syarat akan dibebaskan. Namun, tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan tersebut. Masa pandemi Covid-19 ikut serta memberikan dampak terhadap meningkatnya kasus kriminalitas.

Pada intinya terdapat dua asumsi untuk menjelaskan peningkatan kriminalitas ini. Pertama, kebijakan pencegahan dan mitigasi Covid-19 yang

[81] Fajar Sodiq, *Wawancara,* Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[82] Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, Data kasus kriminalitas, 29 Oktober 2021.

banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian melakukan tindakan kriminal sebagai jalan pintas. Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan Covid-19 yang membebaskan narapidana. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM, hingga bulan Oktokber 2021 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang telah membebaskan 1.055 narapidana.

Selain meningkatnya kriminalitas, dampak lainnya yaitu terjadinya pelanggaran asimilasi. Pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi diterapkan, terjadi pelanggaran asimilasi yang dilakukan oleh narapidana. Narapidana yang mendapatkan asimilasi pada masa pandemi, telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, namun faktanya dia melakukan pelanggaran asimilasi maupun hak integrasi atau dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana. Di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang sendiri, pada bulan April - Juni 2020 tercatat ada 4 narapidana yang melakukan pelanggaran asimilasi. Dua diantaranya melakukan tindak pidana yang sama dengan sebelumnya. Jenis pengulangan tindak pidana yang dilakukan diantaranya tindak pidana narkotika, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan tindak pidana pengeroyokan.[83]

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran asimilasi tersebut. Menurut analisis penulis, lemahnya sistem pengawasan pasca pemberian asimilasi dan hak integrasi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pada Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 telah disebutkan bahwa pengawasan dan bimbingan dilakukan oleh Bapas atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan juga telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Selain yang disebutkan dalam regulasi, pihak lain yang dapat melakukan fungsi pengawasan asimilasi dan hak integrasi diantaranya keluarga

[83] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

klien, petugas lapas/LPKA/rutan (wali/pengasuh), kelompok masyarakat disekitar tempat tinggal, pamong setempat, pemerintah setempat dan aparat penegak hukum terkait.[84]

Pada masa pandemi Covid-19 ini pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon, sms, whatsapp, ataupun videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi. [85] Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari atau program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.

Penulis melihat kurang optimalnya pengawasan karena dilakukan secara daring. Ketika dilakukan secara daring banyak hambatan yang terjadi misalnya sinyal yang kurang baik, keramaian di sekitar rumah membuat percakapan melalui daring tidak terdengar jelas, dan belum ada aturan yang jelas dalam mengatur kegiatan pengawasan yang dilakukan. Pertemuan narapidana dengan pembimbing kemasyarakatan terlalu singkat, selain itu pengawas terkait yang ikut mengawasi tidak diberikan bekal apapun oleh pihak Bapas. Bapas hanya memberikan bekal kepada pembimbing kemasyarakatan, namun tidak dengan pengawas lainnya. Misalnya saja kelompok masyarakat disekitar tempat tinggal, tingkat kesadaran mereka akan urgensi pengawasan kepada narapidana sangat rendah karena tidak dibekali terkait dengan hal tersebut. Hal ini menyebabkan mereka tidak peduli dengan narapidana yang mendapat asimilasi di rumah, di samping itu masyarakat juga sudah memberikan cap negatif terhadap mantan narapidana itu sendiri.

C. Relevansi Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Pada Masa Pendemi Covid-19 terhadap Kondisi Narapidana.

Analisis relevansi kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana

[84] Fajar Sodiq, *Wawancara,* Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[85] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara,* Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021

masih terus bergulir khususnya refleksi dari kondisi narapidana pada masa pandemi Covid-19, baik kondisi narapidana ketika di Lapas mapun kondisi narapidana setelah mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi. Sejatinya, Lapas memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter baik bagi narapidana melalui pembinaan, tentu bukan suatu hal yang mudah ketika narapidana sendiri telah memiliki basic penjahat dalam dirinya.

Narapidana yang dibina dalam lapas bukan serta merta ditempatkan hanya untuk menjalani masa pidananya saja dan dirampas kemerdekaannya, tetapi poin penting dan mulianya adalah lapas harus memiliki kemampuan dalam hal pembinaan narapidana guna menjadi orang yang lebih baik dan dapat berbaur kembali di masyarakat. Arti memasyarakatkan narapidana tersebut adalah menjadikan narapidana diterima menjadi anggota masyarakat dan dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik serta mampu berubah ketika selesai menjalani masa pidananya. Memasyarakatkan kembali narapidana adalah hal terpenting yang harus dilaksanakan oleh lapas. Keberhasilan sistem pembinaan narapidana di lapas sebagai tempat pembinaan narapidana dilihat dari pelaksanaan tugasnya dalam membina narapidana dan memberikan hak-haknya, sehingga mampu menjadi yang lebih baik serta tidak melakukan kejahatan kembali.

Ketika berada di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang narapidana mendapatkan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi sholat berjamaah dan pengajian bagi yang beragama islam sedangkan, bagi penganut Kristiani dilaksanakan Kebaktian sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; mengadakan upacara bendera sebegai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara; Penyelenggaraan pembinaan intelektual atau kecerdasan, sikap dan perilaku; melakukan olahraga pagi untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani; memberikan penyuluhan untuk membentuk kesadaran hukum bagi narapidana; reintegrasi sehat dengan masyarakat; diberikan keterampilan kerja berdasarkan kapasitas dan kemampuannya; serta mengadakan latihan kerja.[86]

Meskipun narapidana mendapatkan proses pembinaan yang cukup baik,

[86] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

namun di sela waktu dimana tidak ada kegaiatan apapun, ada narapidana yang perasaannya selalu dihantui dengan kesedihan dan ketakutan. Narapidana tersebut selalu merasa sedih karena tidak bisa berkumpul dan bertemu dengan keluarga karena pada masa pandemi ini adanya pembatasan berkunjung bagi keluarga narapidana, merasa gelisah karena memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah di keluarganya, merasa takut apabila anak dan istrinya terlantar.[87] Meskipun ketika di dalam Lapas narapidana bekerja dan mendapatkan upah untuk diberikan kepada keluarganya, tetapi sering kali upah tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya. Ketika dianalisis lebih lanjut, narapidana yang berada di dalam lapas ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga napi betah di penjara dan tidak merasa jera.

Setelah narapidana mendapatkan program asimilasi maupun hak integrasi, kondisi yang dialami tentu berbeda atau bahkan lebih parah dari sebelumnya saat di Lapas. Adapun kondisi narapidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi, yaitu:

1. Lemahnya dukungan dari lingkungan Masyarakat.

   Mayarakat adalah salah satu faktor penting keberhasilan kebijakan asimilasi dan hak integrasi. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

   Ketika narapidana mendapatkan kebebasan, mereka menghadapi lingkungan yang menantang dan secara aktif menghalangi mereka untuk

[87] Wawancara dengan R, Narapidana Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

menjadi anggota masyarakat yang produktif. Masyarakat dalam hal ini memiliki karakteristik yang berbeda, ada masyarakat yang menerima, memberi dukungan dan responsif. Namun, ada pula yang tidak menerima dan cenderung memberikan stigmatisasi pada narapidana.

Realitasnya kedua karakteristik tersebut memiliki kecenderungan yang kurang baik. Berdasarkan wawancara penulis dengan narapidana penerima pembebasan bersyarat (hak integrasi), narapidana tersebut mengatakan "ketika saya kembali ke lingkungan masyarakat, saya diterima dengan senang hati dan bisa bergaul kembali dengan masyarakat sekitar saya."[88] Namun, ketika penulis mengamati di lingkungannya ternyata narapidana hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan kembali, masyarakat di lingkungan tersebut banyak yang melakukan tindak pidana narkotika (sama seperti dirinya). Ada yang sudah tertangkap dan saat ini berada di lapas, tetapi ada juga yang belum diketahui kejahatannya oleh pihak kepolisian.

Narapidana lain mengatakan bahwa "ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menerima kehadiran saya di lingkungan masyarakat, karena saya kan mantan napi jadi mereka menghindari saya."[89] Hal ini menyebabkan muncul ketidakpedulian masyarakat terhadap mantan narapidana dengan enggan menerima keberadaannya, sehingga dalam menerapkan proses pembinaan bagi narapidana di lingkungan masyarakat sangat minim.

2. Tekanan Ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

   Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacammacam corak. Pada masa pandmei Covid-19 saat ini, negara indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pembatasan kegaitan sosial secara besar-besaran.

[88] Wawancara dengan W, Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Penerima Hak Integrasi (pembebasan bersyarat) di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[89] Wawancara dengan FMP, Narapidana Kasus Pencurian dan Kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Sebagaian besar narapidana di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang merupakan seorang kepala keluarga, sehingga memiliki tanggungjawab besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya sendiri. Narapidana setelah keluar dari lapas akan kesulitan mencari pekerjaan karena secara hukum dia dikategorikan sebagai mantan penjahat yang tertulis secara legal. Masyarakat yang tidak melakukan kejahatan saja susah mencari pekerjaan pada masa pandemi karena semua kegiatan sosial dibatasi termasuk jumlah karyawan, apalagi mantan narapidana itu sendiri.

3. Adanya pemberian label stigmatisasi kepada narapidana.

   Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap narapidana. Stigmatisasi dalam hal ini merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

Selain yang tertera di atas, pasca narapidana mendapatkan asimilasi maupun hak integrasi pihak lapas sendiri tidak memperbolehkan narapidana keluar rumah untuk beberapa waktu kedepan. Sebelumnya narapidana diharuskan menandatangani surat pernyataan bermaterai. Berdasarkan informasi dari media sosial instagram lapas semarang terdapat keterangan bahwa narapidana tidak diperbolehkan keluar rumah sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai.

Berdasarkan hasil riset yang menjabarkan mengenai kondisi narapidana, penulis berpendapat bahwa apabila dilihat dari kondisi narapidana ketika di lapas maupun pasca bebas, tentu kebijakan tersebut kurang relevan. Perlu adanya persiapan yang lebih matang pasca narapidana mendapatkan asimilasi dan hak integrasi. Namun, pihak lapas telah memberikan keterangan bahwa sistem pemberian asimilasi dan hak integrasi saat ini telah diperbaiki dari sebelumnya, yang mana saat ini adanya sortir narapidana yang lebih ketat sebelum diberikan haknya. Pihaknya juga bekerjasama dengan bapas dalam meningkatkan penelitian kemasyarakatan (Litmas) serta meningkatkan kualitas pembinaan narapidana.[90]

[90] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

BAB IV
TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG IMPLIKASI KEBIJAKAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG

A. Identifikasi Terhadap Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pasca Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Pada Masa Pendemi Covid-19.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai identifikasi terhadap kondisi narapidana. Pengulangan tindak pidana sangat mungkin terjadi karena belum ada kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit pada masa pandemi. Ditambah *basic* narapidana sebagai penjahat dan berkumpul dengan sesama penjahat ketika disel juga menjadi faktor pendukungnya. Pengulangan tindak pidana atau yang dikenal dengan residivis itu sendiri dapat terjadi apabila ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi atau mengulang lagi perbuatannya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menggunakan jenis residivis khusus. Residivis khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis Recidive umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya. Ada 2 kelompok yang dikategorikan sebagai pengulangan kejahatan (residivis) khusus, yaitu :

1. Residiv kejahatan tertentu sejenis. Residiv jenis ini, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu, antara kejahatan yang terdahulu dengan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan yang dilakukan dalam waktu tertentu yaitu 2 tahun sejak adanya putusan Hakim yang tetap dan/atau 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap.
2. Residiv kejahatan kelompok jenis. Adapun syarat jenis ini yaitu, kejahatan-kejahatan yang dilakukan termasuk dalam jenis ini diatur dalam Pasal 486,

487 dan 488 KUHP. Antara kejahatan yang terdahulu dengan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Melakukan pengulangan dengan tenggang waktu belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pasca munculnya kebijakan mengenai pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana pada masa pandemi Covid-19 terdapat problem baru yaitu munculnya pelaku pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam hal ini dikategorikan menjadi 2 yaitu pelanggaran asimilasi dan pelanggaran hak integrasi. Pelanggaran asimilasi merupakan perbuatan narapidana yang telah melanggar peraturan yang berlaku selama menjalankan masa asimilasinya. Sedangkan, pelanggaran hak integrasi merupakan perbuatan narapidana yang telah melanggar peraturan yang berlaku setelah dibebaskan dari Lapas karena mendapatkan hak integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat. Pelanggaran asimilasi dan hak integrasi dibagi lagi dalam 2 kategori yaitu kejahatan yang masuk tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.

Berdasarkan hasil riset penulis di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19 terdapat narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dari seluruh Lapas maupun Rutan di Jawa Tengah. Adapun data narapidana yang melakukan tindak pidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi masa pandemi Covid-19 di Jawa Tengah pada April 2020 - Oktober 2021, sebagai berikut:[91]

[91] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Data Narapidana yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana di Jawa Tengah dari Bulan April 2020 – Bulan Oktober 2021

No	Bulan/ Tahun	Pelanggaran Asimilasi		Pelanggaran Hak Integrasi	
		Umum	Khusus	Umum	Khusus
1.	April – Juni 2020	48	0	2	0
2.	Juli – September 2020	25	1	10	0
3.	Oktober–Desember 2020	22	0	11	0
4.	Januari – April 2021	7	0	4	0
5.	Mei – Juli 2021	5	0	0	1
6.	Agustus – Oktober 2021	10	1	3	1
TOTAL		**117**	**2**	**30**	**2**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa di Jawa Tengah pada masa pandemi Covid-19 terdapat 119 pelanggaran asimilasi dengan rincian 117 tindak pidana umum dan 2 diantaranya tindak pidana khusus. Serta terdapat 32 pelanggaran hak integrasi dengan rincian 30 tindak pidana umum dan 2 diantaranya tindak pidana khusus.

Dari keterangan pihak Kanwil Kemenkumham Jateng, di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang ada 4 narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Keempat narapidana tersebut melakukan pelanggaran asimilasi berupa melakukan tindak pidana umum yang sama dengan sebelumnya. Namun, penulis tidak dapat melakukan identifikasi melalui wawancara langsung kepada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Hal ini dikarenakan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana atau pelanggar asimilasi sedang menjalankan hukuman di sel khusus selama beberapa waktu. Kepala Lapas memiliki kebijakan bahwa selama satu bulan narapidana residivis akan di sel khusus dan tidak dapat mempergunakan haknya selama masa itu.

Sehingga, penulis meminta keterangan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk identifikasi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan serta meminta keterangan dari pihak Lapas dan Kemenkumham untuk memberikan tanggapan penyebab narapidana melakukan pelanggaran asimilasi. Penulis mendapatkan 2 data pelaku pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas 1

Kedungpane Kota Semarang.

Pertama, narapidana berinisial BW alias Kabul merupakan narapidana yang mendapatkan asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Sebelumnya dia menjadi narapidana kasus pencurian dengan pemberatan. Selama menjalani masa asimilasi, dia melakukan kejahatan kembali 2 kali berturut-turut. Pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 pada pukul 14.30 WIB dia melakukan pencurian handphone bersama rekannya dengan berboncengan motor. Keesokan hari, tepatnya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 01.30 WIB dia melakukan pencurian motor dan handphone bersama rekannya disertai kekerasan karena mengancam dengan senjata tajam (belati). Kasus ini sering dikenal dengan pembegalan. Atas perbuatannya tersebut BW dijerat Pasal 363 KUHP berupa pencurian dengan pemberatan, ancamannya paling lama tujuh tahun penjara dan dijerat Pasal 365 KUHP berupa pencurian dengan kekerasan, ancamannya paling lama sembilan tahun penjara.[92]

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Sari Kuliah Hukum Pidana lanjut" Pengulangan tindak pidana yang dilakukan BW masuk dalam jenis kelompok kejahatan Pasal 486 yaitu mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Hal ini terlihat bahwa sebelumnya BW dipidana atas kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, kemudian BW melakukan pengulangan tindak pidana dan dipidana dengan pasal berlapis yaitu Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Kejahatan yang diulangi oleh BW sama dengan kejahatan terdahulu, selain itu kejahatan dahulu dan sekarang sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kedua, narapidana berinisial RIF merupakan narapidana yang mendapatkan asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Sebelumnya dia menjadi narapidana kasus pencurian dengan pemberatan. Selama menjalani masa asimilasi, dia melakukan kejahatan kembali. Pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 21.30 WIB dia melakukan pencurian sepeda motor bersama rekannya di sebuah kos. Atas perbuatannya tersebut RIF dijerat Pasal 363 KUHP berupa pencurian dengan pemberatan, ancamannya paling lama tujuh tahun penjara.

[92] Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, Data Pengulangan Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19, 29 Oktober 2021.

Sejak saat itu asimilasi yang diberikan kepada BW dan RIF telah dicabut oleh pihak Lapas.[93]

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan RIF juga masuk dalam jenis kelompok kejahatan Pasal 486 yaitu mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Hal ini terlihat bahwa sebelumnya RIF dipidana atas kasus pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP, kemudian RIF melakukan pengulangan tindak pidana dan dipidana dengan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan keterangan dari pihak lapas, narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana bisa saja terjadi karena ada beberapa faktor pendukung seperti masyarakat, keluarga, diri sendiri. Lingkungan masyarakatnya berpotensi memberikan energi negatif bagi mantan narapidana, munculnya dari pergaulan dengan lingkungan masyarakat yang kurang baik atau kemungkinan terburuknya narapidana dikucilkan di lingkungan masyarakat. Ada pula lingkungan masyarakat yang kurang mendukung untuk berbuat baik, adanya geng yang memberikan desakan agar melanggar hukum. Dari faktor keluarga memberikan tekanan ekonomi, mungkin dia sebagai kepala keluarga dituntut untuk mencari pekerjaan yang layak dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Dari diri sendiri merasa frustasi karena susah mencari pekerjaan di masa pandemi Covid-19, disisi lain tidak memiliki pengalaman kerja apapun, dan sudah diberikan cap sebagai mantan napi sehingga banyak orang mengkucilkannya. Ketidaksinambungan antara kondisi narapidana di masa pandemi Covid-19 dengan desakan keluarga dan masyarakat menjadi faktor utama.[94]

Berdasarkan keterangan dari pihak kemenkumham, krisis ekonomi pada masa pandemi merupakan alasan narapidana melakukan tindakan kriminal kembali. Selain itu, rata-rata narapidana yang merupakan golongan menengah kebawah dan tidak memiliki pekerjaan, sedangkan pada masa pandemi ini lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan sebelumnya.[95]

---

[93] Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, Data Pengulangan Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19, 29 Oktober 2021.
[94] Fajar Sodiq, *Wawancara,* Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[95] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara,* Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021.

B. Tinjauan Kriminologi Mengenai Faktor Penyebab kriminalitas di Masa Pandemi Covid-19 Pasca Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Terhadap Narapidana.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa meningkatnya kasus kriminalitas menjadi salah satu dampak munculnya kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan pelanggaran asimilasi maupun hak integrasi ikut serta dalam menambah jumlah pelaku pengulangan tindak pidana. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis terkait faktor penyebab kriminalitas yang dilakukan narapidana pasca Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi.

Kejahatan yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh narapidana pelanggar asimilasi atau hak integrasi harus diwaspadai. Menurut Edwin H Sutherland seorang ahli sosiolog dalam konsepnya "kejahatan kerah putih", mengatakan bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Kejahatan yang terjadi pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi merupakan akibat dari krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 berupa mandeknya sistem perekonomian di Indonesia.

Hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya pengangguran karena penyediaan lapangan kerja ditutup total, sedangkan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah setiap waktunya. Tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat. Ketika narapidana mendapatkan kebebasan, mereka menghadapi lingkungan yang menantang dan secara aktif menghalangi mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Mulai dari masyarakat yang menerima namun tidak mendukung untuk berbuat baik. Sampai dengan masyarakat yang tidak mau menerima dan memberikan stigmatisasi terhadap narapidana.

Tindakan penyimpangan yang dilakukan narapidana dianggap sebagai penyakit yang perlu dicarikan obat untuk penyembuhannya. Penyakit yang dimaksud adalah semua bentuk tingkah laku masyarakat yang tidak dianggap sesuai, norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum. Menurut I.S. Susanto dalam

bukunya Kriminologi, mengatakan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi. Istilah kriminologi pertama kali disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879.

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, meyelidiki, sebabsebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressey merumuskan "*The body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It icludes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law ...* " yang mana kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Dalam kriminologi adanya teori-teori untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan.[96]

Dari hasil wawancara di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng, bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya kejahatan atau pelanggaran asimilasi mauapun hak integrasi, yaitu:

1. Faktor Ekonomi.

   Kemiskinan merupakan fenomena yang dapat terjadi di setiap negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

   Rata-rata narapidana merupakan golongan menengah kebawah. Hal tersebut senada dengan alasan narapidana yang mengaku tersedak ekonomi dan iming-iming harta melimpah. "saya melakukan pencurian karena terhimpit ekonomi, sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta namun di

[96] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016, Cetakan Ketiga, hlm. 5-6.

PHK, setelah itu sulit mencari pekerjaan kembali sedangkan kebutuhan hidup saya terus bertambah."[97] Lain halnya dengan narapidana berinisial W pelaku tindak pidana narkotika "menurut saya menjual narkoba lebih menguntungkan dan cepat mendapatkan uang, karena saya sendiri orang miskin jadi butuh uang untuk membiayai hidup, susah cari kerjaan zaman sekarang". Meskipun ketika di lapas mereka mendapatkan pembinaan berupa pembekalan keterampilan dan pekerjaan, namun ketika keluar dari Lapas mereka akan menjadi pengangguran. Mereka tidak memiliki tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis.

Faktor kemiskinan sangat sensitif terjadi terlebih setelah munculnya pandemi Covid-19. Pemerintah melegalkan pembatasan kegiatan sosial secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan semua aspek kehidupan menjadi terbatas contohnya mall dan cafe di tutup, industri dan tempat produksi mengalami penurunan akibat ditutupnya akses produsen ke konsumen, sehingga terjadi pengurangan karyawan. Imbasnya, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan.

Menurut pandangan penulis, telah terjadi diskontinuitas dalam memberikan kebijakan. Berdasarkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana mendapatkan hak pendidikan keterampilan dengan harapan setelah keluar dari Lapas dapat mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian yang diberikan ketika di Lapas. Harapan tersebut tidak mencapai titik keberhasilan karena pada masa pandemi Covid-19 sulit mencari pekerjaan. Ditambah lagi dengan terbitnya surat keterangan bebas dari lembaga pemasyarakatan yang mana tidak menghapus stigma bahwa seorang narapidana dianggap telah dihukum dengan adil. Berbagai peraturan perundang-undangan melarang seorang mantan narapidana untuk kembali berkiprah di masyarakat semisal untuk bekerja dan mengisi jabatan publik. Banyak sekali peraturan hukum yang melarang seseorang yang pernah dipidana untuk mengisi slot pada posisi tertentu. Ini jelas menjadi tantangan seumur hidup bagi narapidana yang kembali kepada masyarakat.

[97] Wawancara dengan R, Narapidana di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

2. Faktor Keluarga.

Keluarga merupakan tempat seseorang untuk bernaung, belajar, dan berlindung dari ancaman eksternal. Keluarga memiliki beberapa fungsi diantaranya, menanamkan pada anggota keluarga sesuatu yang baik dengan mengajarjan pola tingkah laku serta nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat; memberikan kasih sayang kepada anggotanya; menciptakan rasa aman dalam keluarga dan saling melindungi satu sama lain; dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri, keluarga juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan. Hal ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sistem pengawasan dalam internal keluarga. Ada beberapa hal yang dapat terjadi misalnya, narapidana yang menjalani masa asimilasinya di rumah bisa saja mendapatkan tekanan dari keluarga untuk mencari nafkah terlebih ketika dia merupakan tulang punggung keluarga. "faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana yaitu adanya desakan dari keluarga sebagai kepala keluarga dituntut untuk mencari pekerjaan yang layak dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi."[98] Tekanan secara terus-menerus ini dapat menyebabkan dirinya berbuat kejahatan kembali.

Adapula pihak keluarga yang tidak memberikan tekanan, namun lemah dalam sistem kontrol terhadap narapidana asimilasi. Pihak keluarga membiarkan dirinya untuk bergaul dengan siapapun serta tidak peduli dengan apa yang akan dia lakukan bersama orang lain diluar keluarga. Lengahnya pegawasan dari keluarga juga dapat berdampak terjadinya kejahatan kembali.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat.

Mayarakat adalah salah satu faktor penting keberhasilan kebijakan asimilasi dan hak integrasi. Ketika narapidana mendapatkan kebebasan, mereka menghadapi lingkungan yang menantang dan secara aktif menghalangi mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Masyarakat dalam hal ini memiliki karakteristik yang berbeda, ada masyarakat yang menerima, memberi dukungan dan responsif. Namun, ada

[98] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

pula yang tidak menerima dan cenderung memberikan stigmatisasi pada narapidana.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, ada dua sampel narapidana yang mengungkapkan ketika dirinya berada di Masyarakat: Narapidana pertama dengan inisial W (narapidana kasus narkotika) mengaku bahwa masyarakat sekitar menerimanya kembali dengan sepenuh hati. Namun, ketika penulis mengamati di lingkungannya ternyata narapidana tinggal di lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kejahatan kembali, masyarakat di lingkungan tersebut banyak yang melakukan tindak pidana narkotika (sama seperti dirinya). Ada yang sudah tertangkap dan saat ini berada di lapas, tetapi ada juga yang belum diketahui kejahatannya oleh pihak kepolisian.

Narapidana kedua dengan inisial FMP (narapidana kasus pencurian dengan kekerasan) mengakui bahwa kehadirannya tidak diterima oleh masyarakat. Lingkungan masyarakat tidak nyaman dan merasa takut apabila dia kembali karena telah muncul stigmatisasi terhadap dirinya. Stigmatisasi dalam hal ini merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat. Sehingga, dia dijauhi oleh masyarakat sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan dirinya lebih memilih bergaul dengan orang-orang diluar lingkungan masyarakatnya. Sehingga, dia memutuskan untuk membuat *gang* bersama teman-temannya yang berasal dari tempat lain.

4. Faktor Individu.

Kejahatan yang timbul dari individu berkaitan dengan aspek kepribadian dan karakteristiknya. Hal tersebut dapat timbul akibat konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan dalam melakukan suatu hal serta pengendalian diri yang rendah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kedua narasumber terkait dengan penyebab munculnya kejahatan pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19, yaitu: *pertama*, menurut keterangan pihak Polrestabes Semarang “Menurut saya, seseorang yang melakukan

kejahatan kembali karena dirinya sudah melekat dengan kejahatan itu sendiri, seperti halnya tindak pidana narkotika, dia menganggap bahwa mengedarkan narkotika merupakan pekerjaannya, dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain selain itu."[99] Jadi, dapat dikatakan bahwa kejahatan sudah menjadi watak atau karakter dari seseorang yang sudah sering melakukan kejahatan. Sifat-sifat individu tersebut sudah melekat pada suatu kejahatan.

Seseorang yang memiliki karakter yang baik, maka akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Sebaliknya apabila seseorang memiliki karakter yang tidak baik, maka orang tersebut akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, begitu pula sebaliknya.

Kedua, menurut keterangan pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang "Narapidana yang melakukan kejahatan kembali karena merasa frustasi karena susah mencari pekerjaan pada masa pandemi Covid-19, belum lagi bentuk pengucilan di masyarakat."[100] Dalam hal ini individu cenderung tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan.

Selain dua hal yang tersebut diatas, menurut pandangan penulis ada hal lain yang muncul dari diri individu, yaitu minimnya persiapan hidup di luar lapas. Narapidana kurang memiliki bekal untuk hidup di luar Lapas terutama hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

5. Faktor Pengawasan.

Pengawasan merupakan aspek penting dalam membimbing dan memonitoring klien atau narapidana pasca mendapatkan hak asimilasi maupun hak integrasi. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan megandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan bagi pelanggar hukum. Pembimbingan dan Pengawasan

[99] Teti, *Wawancara*, Satreskrim Polrestabes Semarang, 29 Oktober 2021.
[100] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

tersebut dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam naungan Bapas (Balai Pemasyarakatan).

Pembimbing Kemasyarakatan atau Bapas merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pendampingan, pembimbingam, pengawasan dan pembuatan penelitian kemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan baik anak maupun dewasa. Dalam hal ini setiap orang yang telah di vonis untuk menjalani pidana di Lapas akan dimintakan penelitian kemasyarakatan kepada Bapas untuk mengetahui program apa saja yang harus di berikan kepada klien dalam rangka merubah sikap dan perilakunya. Sehingga, klien mampu bersikap sesuai tuntutan norma masyarakat dan mampu beradaptasi dengan baik ketika mereka di kembalikan ke lingkungan masyarakat.

Litmas pembinaan merupakan salah satu langkah yang di tempuh dalam memberikan program pembinaan baik kemandirian mapun kepribadian yang berdayaguna bagi klien. Tujuan akhirnya tentu saja terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan yaitu terciptanya kesatuan hubungan hidup dan kehidupan serta penghidupan warga binaan pemasyakatan.

Selain dari pihak Bapas sendiri, adanya pihak lain yang bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan fungsi pengawasan diantaranya, Keluarga Klien; Petugas Lapas/LPKA/Rutan (Wali/Pengasuh); Kelompok Masyarakat disekitar tempat tinggal; Pamong setempat; Pemerintah Daerah setempat; serta Aparat Penegak Hukum terkait.

Dalam pedoman pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuat bersama-sama dengan pelaksanaan penelitian kemasayarakatan, pendampingan, pembimbingan yang semuanya dilakukan secara Daring. Pengawasan secara daring yang dilakukan oleh PK dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi dengan cara menghubungi klien menggunakan media telpon, sms, whatsapp, maupun videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan.

Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi.[101] Bentuk pengawasan secara daring adalah memastikan keberadaan klien dirumah masing-masing, memastikan aktivitas sehari-hari atau program bimbingan klien dilaksanakan, memastikan hubungan dengan keluarga dan lingkungan dalam keadaan baik, serta klien dalam keadaan sehat.

Penulis melihat kurang optimalnya pengawasan karena dilakukan secara daring. Ketika dilakukan secara daring banyak hambatan yang terjadi misalnya sinyal yang kurang baik, keramaian di sekitar rumah membuat percakapan melalui daring tidak terdengar jelas, dan lain sebagainya. Pertemuan narapidana dengan pembimbing kemasyarakatan terlalu singkat, selain itu pengawas terkait yang ikut mengawasi tidak diberikan bekal apapun oleh pihak Bapas. Bapas hanya memberikan bekal kepada pembimbing kemasyarakatan, namun tidak dengan pengawas lainnya. Misalnya saja kelompok masyarakat disekitar tempat tinggal, tingkat kesadaran mereka akan urgensi pengawasan kepada narapidana sangat rendah karena tidak dibekali terkait dengan hal tersebut. Hal ini menyebabkan mereka tidak peduli dengan narapidana yang mendapat asimilasi di rumah, di samping itu masyarakat juga sudah memberikan cap negatif terhadap mantan narapidana itu sendiri.

Berdasarkan faktor penyebab kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berusaha menganalisis hasil pengamatan tersebut dalam teori kriminologi tentang sebab-sebab kejahatan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, analisis melalui teori Asosiasi Diferensial. Teori ini pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology*. Munculnya teori ini muncul dari kondisi sosial bahwa adanya proses komunikasi dengan orang yang jahat. Kejahatan ada karena dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab dari seorang penjahat. Jadi, menuurt teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Sedangkan yang dipelajari dalam kelompok tersebut

[101] Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021

adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan adanya alasan-alasan atau tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Kaitannya dengan hasil pengamatan terhadap narapidana sangat relevan. Ketika seorang narapidana yang mana memiliki *basic* penjahat, dihukum untuk menjalani masa pidananya di Lapas bersama penjahat-penjahat lain, maka kemungkinan besar akan terbentuk proses komunikasi untuk berbuat jahat kembali dari pergaulan kelompok selama di Lapas. Belum lagi ketika narapidana mendapatkan asimilasi yang mengharuskan kembali ke masyarakat, lingkungan yang buruk juga menjadi faktor pendukung terjadinya pengulangan tindak pidana. Narapidana berinisial WA mengaku "saya melakukan pencurian karena ingin mendapatkan uang untuk berjudi, teman-teman saya suka berjudi, jadi saya ikut untuk melakukan perjudian, saat saya tidak memiliki uang maka saya nekat untuk mencuri, teman saya juga ada yang ikut mendukung."[102]

Kedua, analisis melalui teori Anomie. Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa aturan. Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomi untuk menjelaskan perbuatan deviasi di amerika. Konsep anomie dapat digambarkan sebgaai berikut:

Dalam masyarakat terdapat tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat digunakan. Namun, faktanya tidak setiap individu dapat menggunakan sarana-sarana tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut; Dimana dalam masyarakat terdapat struktur sosial berbentuk kelas-kelas. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Tidak seimbangnya sarana-sarana serta adanya perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustrasi.

Teori ini sangat berkaitan dengan kondisi narapidana pasca mendapatkan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, narapidana yang keluar dari lapas cenderung susah mencari pekerjaan padahal pihak lapas sendiri telah memberikan pembinaan berupa

[102] Wawancara dengan WA, Narapidana Kasus Pencurian dan Pemberatan Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

keterampilan agar narapidana memiliki keahlian. Ketika keluar dari Lapas, seorang narapidana memiliki surat keterangan bebas dari Lapas yang menunjukan bahwa dirinya seorang mantan narapidana. Lapangan pekerjaan apapun yang tersedia, tidak memberikan kesempatan narapidana untuk ikut bekerja. Saat memilih untuk membuka usaha pun, masyarakat sudah mmberikan stigmatisasi kepadanya.

Ketiga, analisis melalui teori Kontrol Sosial. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Teori kontrol sosial meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah *delinkuen*. Dalam hal ini pentingnya proses sosialisasi, bahwa adanya sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen; dilakukan proses pendidikan terhadap individu.

Pasca mendapatkan asimilasi maupun hak integrasi seorang narapidana akan diberikan bimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas. Proses pembimbingan berorientasi pada pentingnya mengembalikan kemampuan seseorang untuk menahan diri berbuat jahat. Dalam mencapai tujuan tersebut Bapas bekerjasama dengan keluarga, kelompok masyarakat dan pemerintah setempat di kediaman narapidana agar terjadinya proses sosialisasi yang *adequat*. Namun, kurangnya kesadaran untuk melakukan kontrol sosial terhadap narapidana akan memicu terjadinya kejahatan kembali.

Keempat, analisis melalui teori Subculture. Teori Subculture menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe *gang*. Kenakalan remaja adalah problem kelas bawah, serta *gang* adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori ini dikenal dengan dua klasifikasi, yaitu,

(1) *Deliquent Subculture*, perilaku *delinkuen* di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi. Jadi, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.

(2) Teori *Diferential Opportunity*, dalam hal ini ada 3 tipe yaitu *Kriminal Subculture*, menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. *Retreatist Subculture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain sebagainya). *Conflict Subculture*, cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perlikau menyimpang lainnya.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu narapidana, yang mana satu diantaranya melakukan kejahatan karena pengaruh dari sebuah gang, dirinya dipidana pada usia 19 tahun "saya melakukan kejahatan berupa pencurian dengan kekerasan, hal ini saya lakukan karena kesepakatan gang saya untuk berbuat kejahatan dan karena pengaruh alkohol."[103] Dirinya ikut *gang* tersbeut karena tidak diterima oleh masyarakatnya.

Dalam rangka mengatasi pengulangan tindak pidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi, pihak Lapas memiliki treatmen yang dilakukan kedepannya "kami telah melaksanakan pemberian asimilasi dan hak integrasi sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam permenkumham nomor 32 tahun 2020, kedepannya lebih memperketat lagi dalam pemberian asmilasi dan hak integrasinya. Selain itu, kami juga akan melakukan sistem litmas atau penelitian kemasyarakatan yang lebih ketat dengan Bapas. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan menjadi rujukan pemberian asimilasi dan hak integrasi yang sesuai untuk narapidana seperti apa. Apabila berdasarkan penelitian narapidana tidak baik, maka tidak akan diberikan hak asimilasi atau hak integrasi."[104] Selain itu, bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, tidak akan diberikan beberapa hak sebagaimana mestinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

[103] Wawancara dengan FMP, Narapidana Kasus Pencurian dan Kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.
[104] Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang
   a. Kebijakan asimilasi dan hak integrasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020. Namun, kebijakan tersebut diperpanjang masa berlakunya menjadi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020. Terakhir diamandemen menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, tetapi hanya beberapa pasal saja yang mengalami perbaikan. Kebijakan tersebut hanya diberlakukan pada masa pandemi Covid-19 yang mana sebagai upaya mengurangi problem overkapasitas lapas serta pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Sistem pemberian asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang tentu berbeda dengan sebelum pandemi. Saat ini semua sistem dilakukan secara daring (*online*), hak asimilasi dijalankan di rumah masing-masing yaitu membaurkan narapidana dengan masyarakat. Pemilahan narapidana dilakukan oleh litmas atau penelitian masyarakat untuk mengetahui kelayakan narapidana dalam menerima asimilasi maupun hak integrasi. Adanya pengecualian pemberian hak, serta memenuhi dokumen yang cukup lengkap berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
   b. Pasca penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pendemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang, memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu: Mengurangi problem *overcrowded* di Lapas, sehingga *social distancing* dapat dilakukan di lapas; Angka penyebaran dan penularan Covid-19 di Lapas berkurang drastis; serta kebijakan ini dianggap efektif karena narapidana bisa mendapatkan haknya serta dapat berbaur kembali di

lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun dampak negatifnya yaitu: Meningkatnya kasus kriminalitas; Terjadinya pelanggaran asimilasi atau adanya naraidana yang melakukan pengulangan tindak pidana; Serta lemahnya sistem pengawasan pasca pemberian asimilasi dan hak integrasi.

c. Relevansi kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pendemi Covid-19 terhadap kondisi narapidana, apabila dilihat dari segi kondisi narapidana ketika di lapas, narapidana mendapatkan proses pembinaan yang cukup baik, namun di sela waktu dimana tidak ada kegaiatan apapun perasaannya selalu dihantui dengan kesedihan; dan ketika di dalam Lapas narapidana bekerja dan mendapatkan upah untuk diberikan kepada keluarganya, tetapi sering kali upah tersebut tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya. Ketika di luar Lapas, lemahnya dukungan dari lingkungan Masyarakat; Tekanan Ekonomi pada masa pandemi Covid-19; Adanya pemberian label stigmatisasi kepada narapidana; dan tidak memperbolehkan narapidana keluar rumah untuk beberapa waktu kedepan.

2. Tinjauan kriminologi tentang Implikasi kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang.

   a. Identifikasi terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19, dilakukan setelah terdeteksi bahwa adanya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali padahal sedang menjalankan asimilasi di rumah. Hal tersebut dapat terjadi karena belum ada kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit pada masa pandemi, Ditambah *basic* narapidana sebagai penjahat dan berkumpul dengan sesama penjahat ketika disel juga menjadi faktor pendukungnya. Menurut pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng, narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor lingkungan masyarakat, keluarga, diri sendiri, bahkan krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

b. Berdasarkan wawancara di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang dan Kanwil Kemenkumham Jateng, dapat disimpulkan bahwa penyebab kriminalitas di masa pandemi covid-19 pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana, dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1) Faktor Ekonomi
2) Faktor Keluarga
3) Faktor Lingkungan Masyarakat
4) Faktor Individu
5) Faktor Pengawasan

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan mengenai faktor penyebab kriminalitas tersebut, dianalisis dengan pisau analisis teori kriminologi, diantaranya: Teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomie, Teori Kontrol Sosial, Dan Teori Subculture.

B. Saran.

Berangkat dari persoalan mengenai meningkatnya kasus kriminalitas dan terjadinya pengulangan tindak pidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini. Dalam rangka mewujudkan Kebijakan asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 ideal, implementatif, dan berkeadilan guna menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana berupa pelanggaran asimilasi dan hak integrasi oleh narapidana, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kemenkumham dan Para Pembuat Hukum (Legislator).
   a. Perlu dilakukan penambahan Pasal pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 mengenai mekanisme penelitian kemasyarakatan yang akan dilakukan, berupa tata cara dan syarat narapidana agar dapat disetujui. Selain untuk memperjelas kualifikasi narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan hak integrasi juga memperketat sistem sortir narapidana.
   b. Memperjelas sistem pengawasan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020. Perlunya pembentukan sub bab baru yang

membahas mengenai ketentuan tertulis sistem pengawasan, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan pembimbingan klien pasca mendapatkan asimilasi maupun hak integrasi pada masa pandemi Covid-19.

2. Bagi Balai Pemasyarakatan.

   Saran dari penulis untuk Balai Pemasyarakatan selaku pengawas dan pembimbing narapidana pasca mendapat asimilasi maupun hak integrasi, yaitu mengenai pelibatan Pokmas (kelompok masyarakat) dalam menjalankan sistem pengawasan, maka perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu mengenai urgensi pegawasan terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi dan hak integrasi. Kelompok masyarakat perlu diberikan bekal agar mereka dapat membantu Bapas dalam sistem pengawasan, kurangnya kesadaraan masyarakat mengenai tugas pengawasan ini membuat mereka tidak peduli dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah atau narapidana yang dibebaskan.

3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia.

   Saran dari penulis untuk Pemerintah Republik Indonesia, yaitu pemerintah harus lebih peduli dengan kondisi narapidana pasca keluar dari Lapas, terutama terkait dengan masalah ekonomi. Ketika pemerintah menyediakan wadah berupa lapangan pekerjaan, namun sisi lain ada pengecualian pemberian kesempatan kerja bagi narapidana, maka akan timbul kesenjangan sosial. Diharapkan pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan khusus bagi narapidana pasca dibebaskan dari Lapas. Mengingat ketika di dalam Lapas, narapidana telah dibekali pembinaan berupa keterampilan bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil dan Adang, *Kriminologi*, Bandung:PT Refika Aditama, 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Mustofa, Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminolog*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi 3, 2013.

Simon R, A. Josias dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung:Lubuk Agung, 2018.

Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang:Yayasan Sudarto, cetakan ke-5, 2018.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, Lampung:CV Anugrah Utama Raharja, 2018.

Susanto, I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2011.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Penelitian dan Jurnal Ilmiah

Abid Mansyurudin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Residivis Pidana Pencurian di Lapas Kelas II A Kabupaten Kendal Tahun 2016", *Skripsi UIN Walisongo Librar*y, 2019.

Ahmad Syaifuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) dalam Proses Pembinaan Narapidana", *Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang*, 2019.

Andhika Rahmad, Amalia Diamantina, dan Lita Tyesta, "Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3, 2016.

Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan

Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)", *Universitas Pancasila: Jurnal SELISIK*, Vol. 6 No. 1, 2020.

Dina Damayanti, "Profesionalisme Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Wirogunan Yogyakarta", *Skripsi Yogyakarta:UANY Library,* 2011.

Ely Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta", *Jurnal Hukum Universitas YARSI,* Vol.8 No.1, 2017.

Giorga Argenta, "Kriteria Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019.

Muhammad Wahyu Darmasnya, "Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 2008-2014", *Library UIN Alauddin Makassar,* 2014.

Muzdalifah Muhammadun, "Konsep Kejahatan dalam Al-Quran (Perspektif Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Hukum Diktum STAIN*, Vol.9 No.1, 2011.

Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol.4 No.1, 2020.

Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Gadjah Mada*, Vol. 09, No.01, 2015.

Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies,* IJCLS II (I), 2017.

Ratri Ariestya Praviyanti, "Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapat Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang)", *Skripsi UMM Library*, 2018.

Resti Arnev, "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang", *Skripsi Universitas Andalas,* 2017.

Syaiful Hidayatullah, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Terjadinya Carok pada Saat Proses Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Pamekasan Madura)”, *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.

Wahdanigsi, “Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sijai”, *Universitas Hasanuddin Makasar*, 2015.

Yurike Violina dan Padmono Wibowo, “Pemberian Program Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona 1”, *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No.1, 2021.

Lain-lain

Radar Semarang, *https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2020/06/17/baru-sebulan-keluar-penjara-napi-asimilasi-nekat-curi-motor/*, diakses pada 18 Oktober 2020.

Sistem Database Pemasyarakatan, Data Jumlah Penghuni Perkanwil per bulan Juni 2021, *http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly*, diakses 18 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah, Rekapitulasi Asimilasi Rumah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19, diberikan pada 25 Oktober 2021.

Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Jawa Tengah Resor Kota Besar Semarang, Data Kasus Kriminalitas dan Pengualngan Tindak Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19, 29 Oktober 2021.

Narasumber Wawancara

Nuhi Risydan Al Anshori, *Wawancara*, Sub Bidang Pembinaan, Teknologi informasi, dan Kerjasama Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jateng, 18 Oktober 2021.

Fajar Sodiq, *Wawancara*, Bidang Pengelolaan Kepribadian Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan R, Narapidana Kasus Pencurian dengan Pemberatan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan W, Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Penerima Hak Integrasi (pembebasan bersyarat) di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan FMP, Narapidana Kasus Pencurian dan Kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan WA, Narapidana Kasus Pencurian dan Pemberatan Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, 09 Oktober 2021.

Teti, *Wawancara*, Satreskrim Polrestabes Semarang, 29 Oktober 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG).

1. Apa perbedaan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana?
2. Berapakah jumlah pemberian asimilasi dan hak integrasi di masa pandemi?
3. Bagaimana prioritas dan proses klasifikasi narapidana yang berpotensi mendapatkan program Asimilasi dan Hak Integrasi?
4. Bagaimana proses pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana di Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang?
5. Siapa yang membantu narapidana dalam mengurus syarat administrasi untuk mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi?
6. Apa dampak yang timbul pasca pertama kali diterapkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi?
7. Apakah kasus kriminalitas yang terjadi merupakan kasus tindak pidana baru atau kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana?
8. Apa saja jenis pengulangan tindak pidana yang dilakukan narapidana?
9. Bagaimana menurut tanggapan anda terkait dengan relevansi kebijakan asimilasi dan hak integrasi dengan kondisi narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi?
10. Berapa jumlah narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana pasca kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi?
11. Berapa presentase kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana?
12. Apa saja pengulangan tindak pidana yang dilakukan?
13. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana?
14. Menurut anda, apa faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19?
15. Apakah ada treatmen tertentu bagi narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi?

16. Bagaimana kebijakan maupun koreksi di masa yang akan datang?

LAMPIRAN 2 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH).

1. Bagaimana kebijakan Kemenkumham mengenai program Asimilasi dan Hak Integrasi pada masa pandemi Covid-19 dapat dipercepat?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan narapidana pasca kebijakan asimilasi dan hak integrasi diberlakukan?
3. Bagaimana proses kontrol terhadap narapidana yang dilakukan pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi?
4. Bagaimana menurut tanggapan anda terkait dengan relevansi kebijakan asimilasi dan hak integrasi dengan kondisi narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi?
5. Bagaimana efektivitas pasca pemberian asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19?
6. Menurut anda, apa faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19?

LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (NARAPIDANA DI LAPAS KELAS 1 KEDUNGPANE KOTA SEMARANG).

Identitas Narapidana (Nama, Alamat, dan Usia)

Kondisi Narapidana ketika di Lapas :

1. Apa jenis tindak pidana yang anda lakukan?
2. Apa anda melakukan pengulangan tindak pidana?
3. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan pengulangan tindak pidana?
4. Bagaimana kondisi anda ketika hidup di Lapas?
5. Apa saja kegiatan anda ketika berada di Lapas?

Kondisi narapidana setelah mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi :

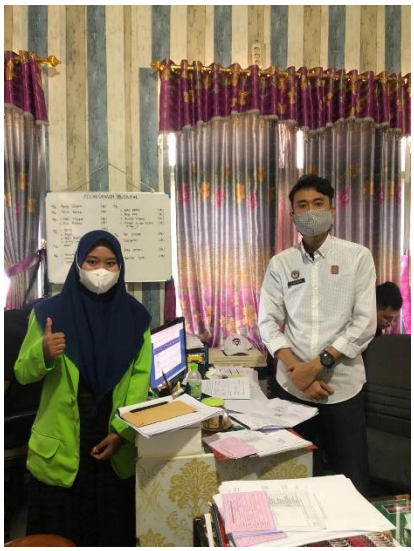
6. Bagaimana latarbelakang keluarga dan lingkungan anda?
7. Apakah anda memiliki pekerjaan ketika memulai hidup di lingkungan masyarakat?

8. Bagaimana respon keluarga maupun masyarakat ketika anda keluar dari Lapas?
9. Bagaimana cara anda bersosialisasi dengan masyarakat?
10. Apa pengulangan tindak pidana yang anda lakukan pada masa pandemi Covid-19?
11. Mengapa anda melakukan pengulangan tindak pidana kembali setelah mendapatkan program asimilasi/hak integrasi pada masa pandemi ini?
12. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi anda melakukan kejahatan tersebut?
13. Apakah ada tekanan dari keluarga maupun lingkungan masyarakat?

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (POLRESTABES SEMARANG).

1. Berapa persen peningkatan kriminalitas di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait dengan meningkatnya kasus kiminalitas pada masa pandemi Covid-19?
3. Menurut anda, apa faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19?
4. Berapakah jumlah kasus penangkapan pelaku pengulangan tindak pidana pasca mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi pada masa pandemi Covid-19 di Polrestabes Semarang?
5. Apa motif pelaku tersebut melakukan pengulangan tindak pidana?

LAMPIRAN 5 : FOTO WAWANCARA

(Wawancara dengan pihak Lapas Kelas 1 Kedungpane Kota Semarang)




(Wawancara dengan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng)




(Wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang)

(Foto wawancara dengan narapidana tidak dapat dilakukan karena penulis tidak diperbolehkan membawa handphone ke dalam Lapas)